

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS



PEMERINTAH DAERAH
KOTA BLITAR

Tahun 2021-2026



**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DAERAH
KOTA BLITAR**

Jl. Trembesi No 13 Kota Blitar
Telp./Fax. 0342-800104
Email : disperta@blitarkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 ini.

Telah tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 menjadi pedoman utama pembangunan di Kota Blitar selama kurun waktu 5 tahun mendatang. Dalam Perubahan Kedua RENSTRA ini dinyatakan Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang akan menjadi fokus pencapaian pembangunan pertanian, perikanan dan peternakan di Kota Blitar selama kurun waktu lima tahun kedepan. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi pedoman yang kuat bagi pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap berada di koridor pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Semoga dokumen dapat bermanfaat secara internal bagi Dinas maupun semua pihak yang berkepentingan (stake holders).

Blitar, 17 Mei 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA BLITAR



I. RODIYAH

Pembina Utama Muda

NIP. 19630610 199203 2 008

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN -----	(I)
1.1.	Latar Belakang -----	1
1.2.	Landasan Hukum-----	5
1.3.	Maksud dan Tujuan-----	10
1.4.	Sistematika Penulisan-----	10
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DAERAH KOTA BLITAR -----	(II)
2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar -----	1
2.2.	Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar -----	10
2.3.	Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar -----	12
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD -----	23
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DAERAH KOTA BLITAR -----	(III)
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar -----	1
3.2.	Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih -----	2
3.3.	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Terkait -----	4
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis-----	11
3.5.	Penentuan Isu-isu Strategis -----	13
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN -----	(IV)
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN -----	(V)
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN -	(VI)
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN-----	(VII)
BAB VII	PENUTUP -----	(VII)

LAMPIRAN

1. Matriks Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026.

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Blitar Tahun 2011-2030 telah disahkan sebagai pedoman utama arah pembangunan jangka panjang Kota Blitar. Untuk menjadikan pelaksanaan pembangunan tersebut lebih sistematis, efektif dan terfokus maka dibutuhkan perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) masing-masing PD. RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2016-2021 disusun untuk menjadi pedoman arah pembangunan bidang pangan, perikanan dan pertanian selama periode lima tahun kedua pembangunan jangka panjang 2011-2030.

Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Strategis PD Pemerintah Kota Blitar disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

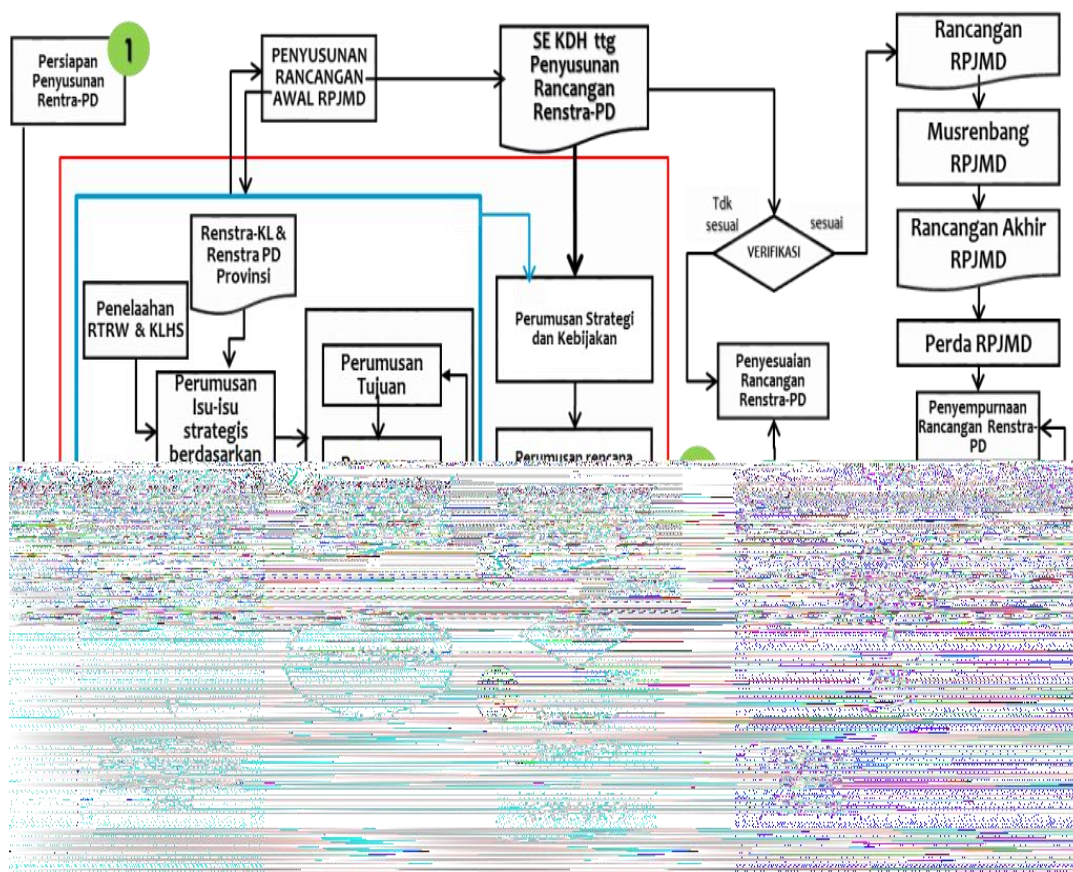
Dengan terbitnya Perda No 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Blitar nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta menindaklanjuti terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

2021 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar melakukan perubahan pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dilevel kegiatan dan sub kegiatan baik pada nomenklatur, indikator dan substansinya yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja.

Secara teknis, proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dearah Kota Blitar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun yang mencakup antara lain analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam RPJMD, sehingga diharapkan arah kebijakan yang dimuat dalam renstra ini sejalan dengan RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026.

Adapun tahapan penyusunan renstra dapat diformulasikan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1.1.
Tahapan/ Proses Renstra



Sumber : **Permendagri 86 Tahun 2017**

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dearah Kota Blitar mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPMD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah dan disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dearah Kota Blitar digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dearah Kota Blitar pada dasarnya merupakan suatu proses penyesuaian pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Oleh karenanya kualitas dokumen Perubahan Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dearah Kota Blitar ini telah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi:
 - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan selaras dengan RPJMD dan mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan;
 - b. analisis permasalahan;
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. analisis isu strategis;
 - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD;

- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam RPJMD.
3. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan RPJMD.
 4. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Keputusan Walikota Blitar

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6000041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); 24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode

- dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBHDR Tahun Anggaran 2022, DBHCHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025;
 35. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030;

36. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
37. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, Lembaran Daerah kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4;
38. Peraturan Walikota Blitar Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Strategis ini adalah :

1. Untuk menyediakan arah kebijakan pembangunan di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan selama 5 (lima) tahun, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 - 2026.
2. Untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2021` - 2026.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ini adalah :

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama 5 (lima) terakhir pada periode pembangunan yang lalu.
2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama 5 (lima) tahun mendatang.
3. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2021 - 2026 kedalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan.
4. Menetapkan rencana program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang.
5. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama 5 (lima) tahun mendatang.
6. Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD; dan

7. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DAERAH KOTA BLITAR

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar
- 2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DAERAH KOTA BLITAR

- 4.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar
- 4.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
- 4.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Terkait
- 4.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

4.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Daerah Kota Blitar

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENGAWASAN

BAB VII PENUTUP

2

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Blitar Nomor 50 Tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
- e. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;

- f. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- g. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyuluhan pertanian;
- h. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengelolaan perikanan budidaya;
- j. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- k. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
- l. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penanganan kerawanan pangan;
- m. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengawasan keamanan pangan;
- n. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perizinan usaha pertanian;
- o. pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- p. peremajaan data dalam bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan untuk tingkat kota;
- q. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- r. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- s. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- t. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- u. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- v. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- w. pengelolaan pengaduan masyarakat;

- x. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- y. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
- d. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan
- e. Bidang Peternakan
- f. UPT Perikanan budidaya Air Tawar/Air Payau
- g. UPT Rumah potong Hewan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota.

Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang – bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan. Untuk menjalankan tugas, Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menjalankan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan ketahanan pangan dan pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;

- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
- d. fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- i. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
- j. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- m. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
- n. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- o. pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- p. fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
- q. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
- r. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- s. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

- t. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- u. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
- v. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di urusan ketahanan pangan dan pertanian;
- w. fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- x. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- y. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- z. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- aa. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi;
 - a. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan. Untuk menjalankan tugasnya Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan menjalankan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. penyusunan program/kegiatan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan dan kerawanan pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- e. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;

- f. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi, penganekaragaman konsumsipangan, dan pengembangan pangan lokal;
- g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, konsumsi pangan, distribusi pangan, keamanan pangan dan kerawanan pangan;
- h. peremajaan data dalam sistem informasi bidang Perikanan untuk tingkat kota;
- i. perumusan bahan, pelaksanaan bimbingan teknis budidaya, produksi, olahan, dan pemasaran hasil perikanan;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan kegiatan pencegahan, perlindungan, pemberantasan dan pengendalian hama dan penyakit ikan;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- l. identifikasi dan inventarisasi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan;
- m. pengkoordinasian, pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan kegiatan Perikanan;
- n. pelaksanaan sosialisasi dan implementasi bidang Perikanan;
- o. pemberian izin/rekomendasi di bidang perikanan;
- p. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- q. perencanaan, pengolahan, pendataan bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- r. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- s. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan dan dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;

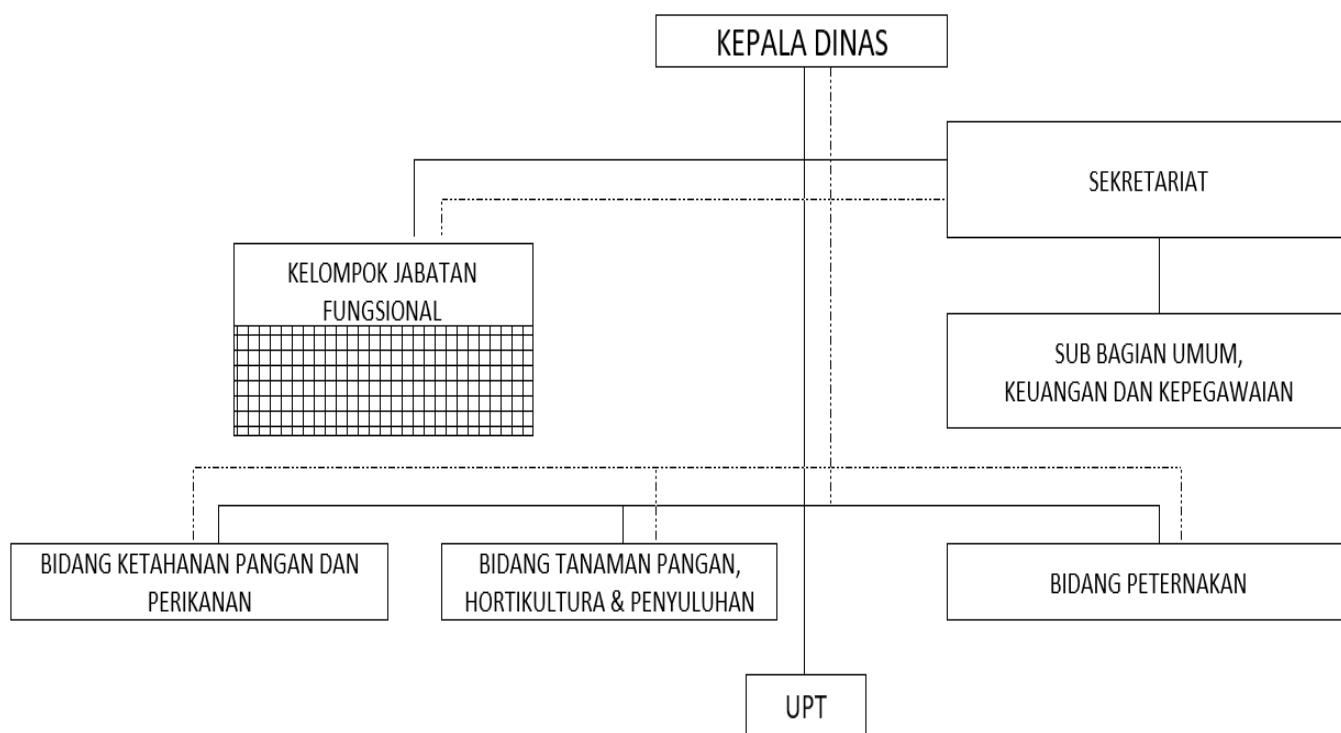
- b. penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan;
- c. perencanaan operasional program bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
- d. penginventarisan, penelitian, pengkajian dan peremajaan data serta potensi dalam sistem informasi untuk tingkat kota pada bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian intern dan antar unit kerja terkait di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, implementasi dan pengembangan kegiatan pada bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan;
- h. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- i. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- j. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- k. melakukan penyuluhan dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- l. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih;
- m. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- n. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan;
- o. pemberian beimbinaagn penerapan peningkatan produksi tanaman pangan;
- p. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan;
- q. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan;
- r. pemberian izin/rekomendasi di bidang pertanian;

- s. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pertanian;
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Peternakan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Peternakan. Untuk menjalankan tugasnya Bidang Peternakan menjalankan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Peternakan;
- c. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang Peternakan;
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang Peternakan sesuai kewenangannya;
- e. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- f. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- g. pengendalian penyakit hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner;
- h. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- i. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- j. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- k. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- l. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- m. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di Bidang Peternakan;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundangan.

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



2.2 SUMBER DAYA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BLITAR

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya. Pelaksanaan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar didukung dengan keberadaan SDM dan Sarana dan Prasarana yang memadai.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian per Januari 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar didukung keberadaan 59 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Data Pegawai Menurut Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah Total Pegawai (orang)
1	PNS	29	23	52
2	PPPK	4	2	6
3	PTT	1	-	1
	JUMLAH	34	25	59

Pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti pada tabel diatas sejumlah 52 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Data Pegawai Dengan Status PNS Menurut Golongan

No.	Golongan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah Total Pegawai (orang)
1	IV	5	4	9
2	III	12	20	32
3	II	8	-	8
4	I	3	-	3
	JUMLAH	28	24	52

Tabel. 2.3
Data Pegawai Dengan Status PNS Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah Total Pegawai (orang)
1	Jabatan Struktural	6	13	19
2	Jabatan Fungsional Umum	11	1	12
3	Jabat Fungsional Khusus	12	9	21
	JUMLAH	29	23	52

Tabel. 2.4
Data Pegawai Dengan Status PNS Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah Total Pegawai (orang)
1	Pasca Sarjana (S-2)	1	0	1
2	Kedokteran Hewan	2	2	3
3	Sarjana (S-1)/D-IV	11	16	27
4	D-III	1	1	1
5	D-II	-	-	-
6	D-I	-	-	-
7	SLTA	10	3	16
8	SLTP	1	-	1
9	SD	3	-	3
	JUMLAH	29	23	52

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain kualitas dan kuantitas SDM yang memadai, ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat menunjang kinerja organisasi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar memiliki beberapa aset tanah dan bangunan yang didukung sarana penunjang agribisnis yang cukup memadai. Jumlah aset tanah dan bangunan yang dikuasai sampai dengan awal tahun 2022 disajikan Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar

Kode					Nama Bidang Barang	Keadaan Akhir (31 Desember 2021)		
						Jumlah		Kondisi
1	3	2	01	01	Gedung Kantor	1	unit	Baik
1	3	2	01	03	Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	3	unit	Baik
1	3	2	02	01	Rumah Potong Hewan	2	unit	Baik
1	3	2	02	02	Kantor UPT Budidaya Perikanan Air Tawar/Air Payau	1	unit	Baik
1	3	2	02	05	Alat Angkut Kendaraan Bermotor Roda 4	5	unit	Baik
1	3	2	03	01	Alat Angkut Kendaraan Bermotor Roda 3	4	Buah	Baik
1	3	2	03	02	Meja dan Kursi Kerja/Rapat	73	Buah	Baik
1	3	2	03	03	Komputer/Laptop	24	Buah	Baik

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar mempunyai 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu UPT Rumah Potong Hewan (RPH) dan UPT Budidaya Perikanan Air Tawar / Air Payau. UPT Rumah Potong Hewan (RPH) memiliki 2 (unit) pelayanan yaitu RPH Unggas dan RPH Ruminansia (sapi, kambing, babi). UPT RPH ini telah didukung peralatan yang memadai dan telah memiliki sertifikat Halal dari MUI serta Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Dengan ini UPT RPH telah memenuhi persyaratan teknis baik dari segi kehalalan produknya maupun keamanan produknya sehingga produk yang dihasilnya terjamin Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

UPT Budidaya Perikanan Air Tawar / Air Payau memiliki 2 (unit) pelayanan yaitu Balai Benih Ikan (BBI) dan pusat Informasi Ikan Hias (PIAH). Balai Benih Ikan telah didukung sarana prasarana yang memadai yang terdiri dari kolam indukan, kolam, pembesaran dan kolam karantina. Komoditas yang dibudidayakan berupa benih ikan Nila, Lele dan Koi. Sedangkan untuk Pusat Informasi Ikan Hias memiliki 1 (unit) kantor dan 9 (Sembilan) kios ikan yang disewakan kepada pelaku usaha ikan hias di Kota Blitar.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DAERAH KOTA BLITAR

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar selama tahun 2016 - 2021 berpedoman pada RENSTRA Tahun 2016 - 2021. Sebagian besar target yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 dapat tercapai dengan baik.

Tabel. 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	IKU	IKK	Target Indikator Lainnya	Data Awal 2016	Target Renstra Perangkat Daerah/Lainnya					Realisasi Capaian				Rasio Capaian Tahun				Catatan analisis
			-2021	-2021	-2021		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5		11	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	14
I.	Indikator IKU																			
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	-	86			81,3	82	83	84	85	86	82,57	83,17	84,3	85,25	100,70	100,20	100,36	100,29	
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	-	87			80,4	81	82	83	84	85	81,28	83,13	84,89	86,2	100,35	101,38	102,28	102,62	
II.	Indikator Sasaran																			
1.	Ketersediaan pangan utama	ton			58573	NA	44814	54691	56895	57188	58573	54662	55757	67926	65973	121,98	101,95	119,39	115,36	
2.	Tingkat konsumsi energi perkapita	%			85,07	NA	81,45	82,74	84,14	84,6	85,07	84,86	84,96	88,9	101,13	104,19	102,68	105,66	119,54	
III.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)																			
1.	Ketersediaan pangan (Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun : Jumlah	ton/jiwa/ tahun		0,48		0,33	0,4	0,42	0,44	0,44	0,44	0,36	0,4	0,43	0,4	90,00	95,24	97,73	90,91	
2.	Angka Konsumsi Ikan : target Kota Blitar x 100	-		100		69,27	100	100	100	100	100	55,51	54,59	55,83	56,94	55,51	54,59	55,83	56,94	
3.	Angka Produksi Ikan konsumsi : target Kota Blitar	Ton		100		97,76	100	100	100	100	100	96,06	91,97	97,31	100,89	96,06	91,97	97,31	100,89	
4.	Produktivitas Padi	Ton/ha		8,24		8,04	8,08	8,12	8,16	8,2	8,24	8,053	8,12	8,16	8,2	99,67	100,00	100,00	100,00	
6.	Produksi Daging per tahun	ton				3.748	3397	3467	3.534	3.605	3.677	3.901	3.968	3.980	3.844	114,84	114,45	112,61	106,63	
7.	Ada SK Walikota tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Blitar	-		Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	Ada	-	Keberadaan Dewan Ketahanan Pangan sudah
IV.	Indikator Kinerja Program																			
1.	Jumlah produksi ikan konsumsi	ton				183,79	197	207	219	229	240	189,24	190,63	212,13	231,03	96,06	91,97	96,86	100,89	
2.	Jumlah produksi ikan hias	ekor				4.342.110	4.343.462	4.343.462	4.452.049	4.563.350	4.677.434	4.648.393	4.399.273	4.402.015	4.563.416	107,02	101,28	98,88	100,00	
3.	Jumlah produksi benih ikan	ekor				8.311.690	8.457.360	8.477.923	8.647.482	8.820.432	8.996.841	8.509.927	8.680.125	6.892.760	8.821.468	100,62	102,39	79,71	100,01	
4.	Produktivitas jagung	ton/ha				67,40	-	6,76	6,78	6,80	7,00	6,75	6,68	6,78	6,81	-	98,80	100,00	100,13	
5.	Jumlah produksi susu	liter				501.000	468.000	519.000	501.000	539.000	549.000	613.140	621.720	625.700	704.430	131,01	119,79	124,89	130,69	
6.	Jumlah produksi telur	ton				2.663	2.577	2.727	2.760	2.793	2.826	3.283,13	3.306,96	3.475,25	3.833,44	127,40	121,27	125,91	137,25	
7.	Angka konsumsi energi	kkal/kap/ hari				-	-	1.799	1.809	1.819	1.829	1.867,00	1.869,00	1.911,20	2.225,00	-	103,89	105,65	122,32	
8.	Angka konsumsi protein	gr/kap/ hari				-	-	60,70	60,90	61,10	61,30	0	53,2	66,38	86	-	87,64	109,00	140,75	

Ketahanan pangan merupakan kondisi kecukupan, ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan terpenuhinya kebutuhan pangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif bagi masyarakat untuk menuju masyarakat yang sehat sejahtera dan produktif. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam bahan makanan atau kelompok bahan makanan yang didasarkan pada sumbangan sosial, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi, yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi pangan penduduk baik kuantitas, kualitas maupun keragaman dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan citarasa. Berdasarkan data diatas Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dalam kurun waktu tahun 2016-2021 terus mengalami peningkatan dari 81,3 pada tahun 2016 menjadi 85,25 pada tahun 2020. Sedangkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan selama kurun waktu 2016-2021 juga terus mengalami peningkatan yaitu dari 80,4 pada tahun 2016 menjadi 86,20 pada tahun 2020. Ketersediaan pangan utama selama kurun waktu 2017-2020 mengalami peningkatan dari 54.662 ton pada tahun 2017 menjadi 65.973 ton pada tahun 2020. Sedangkan ketersediaan pangan rata-rata per jumlah penduduk meningkat dari 0,36 ton/jiwa/tahun pada tahun 2017 menjadi 0,4 ton/jiwa/tahun. Dari segi tingkat konsumsi energi juga mengalami peningkatan dari 84,86% pada tahun 2021 menjadi 101,3% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi konsumsi masyarakat maupun ketersediaan pangan di masyarakat terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas (kecukupan gizi, energi dan protein), keberagaman dan kuantitas sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Blitar.

Peningkatan kondisi ketahanan pangan masyarakat tersebut dilakukan dengan upaya mendorong kesadaran masyarakat antara lain melalui introduksi pengolahan makanan berbahan non beras, lomba pangan olahan, lomba cipta menu non beras, lomba memasak menu berbahan ikan serta berbagai penyuluhan/sosialisasi tentang Gerakan Pangan 3BSA (Beragam, Bergizi, Berimbang, Sehat dan Aman). Selain itu ketersediaan bahan pangan pokok yang mencukupi dari segi distribusi, produksi dan ketersediaannya mampu mencukupi kebutuhan energi masyarakat Kota Blitar. Dengan mengoptimalkan gerakan pemanfaatan lahan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari guna pemenuhan gizi keluarga.

Pemenuhan angka konsumsi ikan dari target yang ditetapkan mengalami penurunan dari 69,27% pada tahun 2016 menjadi 56,94% pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan target capaian angka konsumsi ikan dimana pada tahun 2016 target sebesar 16,40

kg/kap/tahun berubah menjadi 31,47 kg/kap pertahun pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Bila dilihat dari data diatas terjadi kenaikan pemenuhan angka konsumsi ikan dari 56,51% pada tahun 2017 menjadi 56,94% pada tahun 2020. Upaya yang dilakukan untuk mendorong masyarakat agar lebih meningkatkan konsumsi ikan dilakukan melalui Gerakan Makan Ikan dengan sasaran anak usia balita dan sekolah dasar. Hal ini dikarenakan ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang murah dan mudah didapat. Sedangkan anak usia dini dan usia sekolah dasar merupakan usia emas dalam tumbuh kembang manusia yang menentukan kualitas sumber daya manusia kedepan. Selain itu Gerakan makan ikan juga merupakan salah satu upaya dalam pencegahan dan penanganan balita stunting agar kebutuhan gizi dan energinya dapat tercukupi dengan baik. Akan tetapi dari data diatas juga menunjukkan bahwa angka konsumsi ikan masih jauh dari target yang ditetapkan sehingga upaya Gerakan Makan Ikan perlu terus dilakukan dengan lebih massif dan efektif dengan memperluas sasaran, media dan metode yang digunakan.

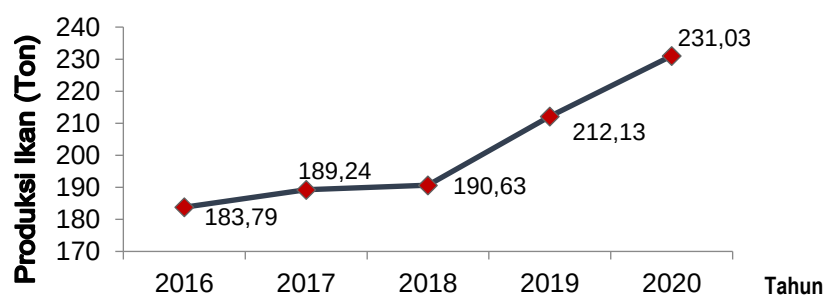
Indikator kelautan dan perikanan Kota Blitar mengalami tren fluktuatif cenderung meningkat pada Tahun 2016-2020. Capaian produksi ikan konsumsi dari target yang telah ditetapkan mengalami peningkatan dari 97,76% pada tahun 2016 menjadi 100,89% pada tahun 2020. Capaian produksi ikan konsumsi pada tahun 2020 sebesar 231,030 ton/tahun mengalami kenaikan sebesar 25,70% dibandingkan capaian produksi pada tahun 2016 yaitu 183,79 ton/tahun. Capaian produksi ikan hias sebesar 4.563.416 ekor/tahun pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 5,1 % dibandingkan capaian tahun 2016 yaitu sebesar 4.342.110 ekor/tahun. Produksi ikan hias ini terdiri dari jenis ikan koi, cupang dan manvis. Demikian juga dengan produksi benih ikan juga mengalami kenaikan sebesar 1,65 % dibanding tahun 2016 yaitu dari 8.311.690 ekor/tahun pada tahun 2016 menjadi 8.449.027 ekor/tahun pada tahun 2020. Pada tahun 2020 walaupun ditengah masa pandemi covid-19 yang membatasi kegiatan pertemuan kelompok, akan tetapi kegiatan pembinaan dan pendampingan tetap dilakukan dengan memperhatikan protocol Kesehatan. Hal ini dimaksudkan agar usaha budidaya perikanan tetap berjalan dan menjadi sumber perekonomian yang menjajikan di tengah masa pandemi.

Selain pembinaan dan pengelolaan secara on farm (hulu) juga dilakukan secara off farm (hilir). Pembinaan dan pengelolaan perikanan secara off farm difokuskan pada kelompok usaha perikanan. Di Kota Blitar terdapat 26 usaha pengolahan perikanan dan 47

usaha pemasaran perikanan. Pelatihan dan pembinaan untuk diversifikasi produk dan pemasaran diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi dan jangkauan pemasaran dari produk hasil perikanan di Kota Blitar terutama pada masa pandemi ini dimana kita dituntut untuk lebih kreatif. Karena secara tidak langsung kapasitas produksi *off farm* akan mempengaruhi permintaan terhadap produksi hasil perikanan. Selama ini kebutuhan bahan baku usaha perikanan *off farm* masih banyak berasal dari luar Kota Blitar. Peningkatan produksi ikan di Kota Blitar didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana perikanan, pembinaan UPR (Unit Pembenihan Rakyat) Perikanan serta sosialisasi tentang pentingnya mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein tinggi. Capaian produksi perikanan dari target yang telah ditetapkan mengalami penurunan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Capaian produksi ikan konsumsi pada tahun 2017 sebesar 96,06% menurun menjadi 91,97% pada tahun 2018 dari target yang telah ditetapkan. Walaupun jumlah produksi ikan konsumsi mulai tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan rata-rata 5,97% setiap tahunnya. Demikian juga dengan capaian produksi ikan hias dan benih ikan mengalami penurunan pada tahun 2019. Akan tetapi pada tahun 2020 capaian sector perikanan rata-rata sebesar 100,29% dari target yang telah ditetapkan. Penurunan capaian ini disebabkan adanya kemarau panjang, sehingga ketersediaan air sangat kurang dan menyebabkan gagal panen. Selain itu, gagal panen juga disebabkan beberapa hal, yaitu: 1) minimnya pelaksanaan pelayanan terpadu kesehatan ikan dan lingkungan (keskanling) untuk mencegah adanya penyakit dan kematian benih ikan secara massal, 2) minimnya intensitas pendampingan dan pembinaan penyuluh dan pengawas perikanan, pelatihan perikanan tepat sasaran, 3) minimnya penyuluhan dan pendampingan kepada pembudidaya perikanan oleh penyuluh dan pengawas perikanan. Perkembangan hasil produksi perikanan ditunjukkan oleh grafik berikut ini .

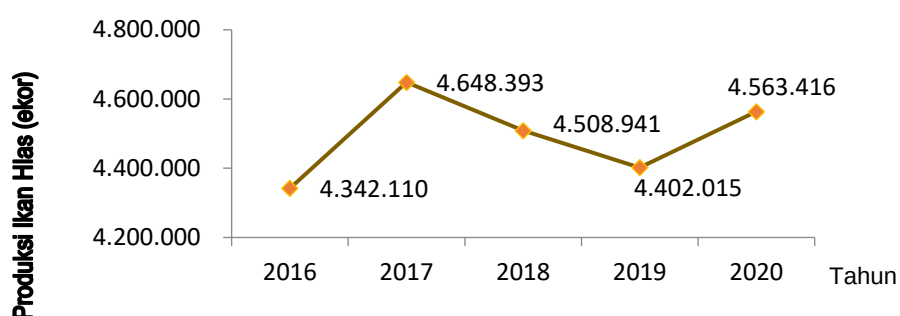
Grafik. 4

Grafik Perkembangan Produksi Ikan Konsumsi Tahun 2016 - 2020



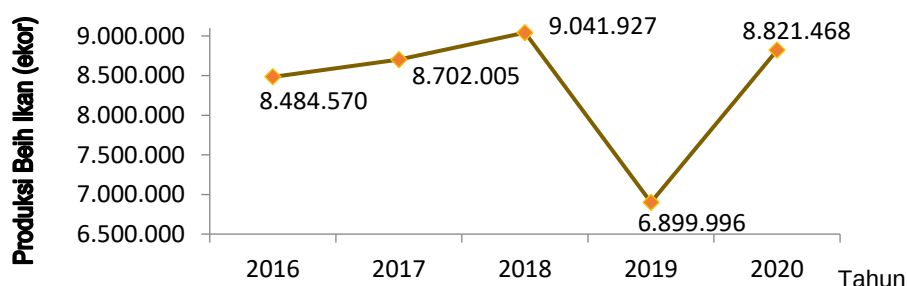
Grafik. 5

Grafik Perkembangan Produksi Ikan Hias Tahun 2016-2020



Grafik. 6

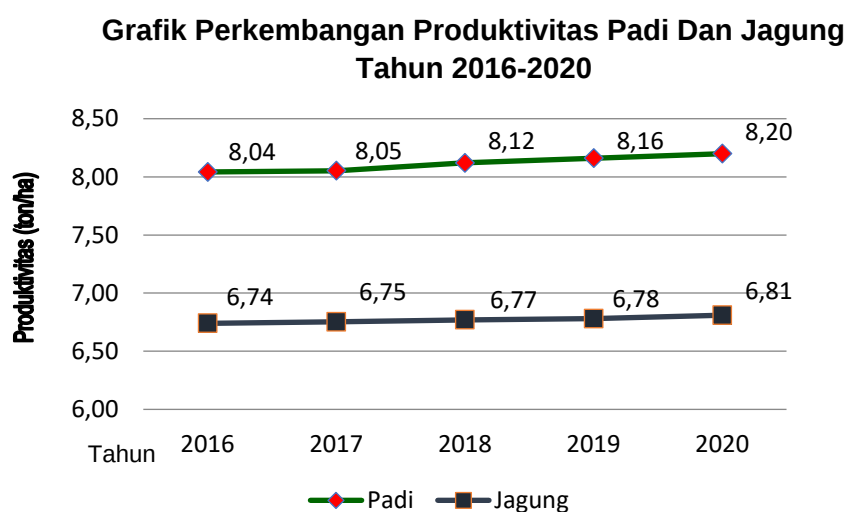
Grafik Perkembangan Produksi Benih Ikan Tahun 2016-2020



Kinerja bidang pertanian ditunjukkan dengan produktivitas padi dan jagung . Produktivitas padi di tahun 2016 sebanyak 80,4 kwintal/hektar meningkat menjadi 82,00 kwintal/hektar di tahun 2020. Sedangkan produktivitas jagung sebesar 6,74 ton/ha pada tahun 2016 menjadi 6,81 ton/ha pada tahun 2020. Peningkatan produktivitas padi disebabkan karena peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pertanian meliputi penyediaan Jaringan Usaha Tani (JITUT), Jalan Pertanian, Pupuk Bersubsidi serta pendampingan dan pembinaan pada kelompok tani yang dilakukan terus menerus. Walaupun tidak dipungkiri bahwa peningkatan produktivitas padi tidak terlalu tinggi karena cuaca ekstrim yang terjadi terutama di sepanjang tahun 2019 yang menyebabkan jadwal tanam dan panen mengalami kemunduran. Hal ini perlu diwaspadai bahwa produktivitas padi mungkin telah mengalami *levelling off* (batas maksimal) sehingga perlu dilakukan terobosan dan inovasi agar supaya ketersediaan bahan pangan pokok terutama padi tetap terjaga untuk masyarakat di Kota Blitar. Penyuluhan pertanian melalui pembinaan dan pendampingan petani merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berperan penting dalam

peningkatan produktivitas pertanian. Agar pembinaan dan pendampingan dapat dilakukan secara maksimal maka dilakukan penyusunan program penyuluhan dimana dalam program penyuluhan merupakan rencana pembinaan dan pendampingan kelompok yang mengakomodasi kebutuhan dari kelompok tani. Selain itu untuk menjaga ketersediaan sarana produksi pertanian selama tahun 2017-2020 dilakukan monitoring pada kios penyedia sarana produksi pertanian. Penyaluran pupuk subsidi didasarkan pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Kelompok Tani yang telah di susun oleh masing-masing kelompok tani sesuai dengan rekomendasi yang telah di tentukan. Pada tahun 2020 penyaluran pupuk bersubsidi telah melalui mekanisme e-RDKK serta menggunakan Kartu Tani. Penggunaan Kartu Tani dimaksudkan agar terwujudnya distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan Asas 6 (enam) Tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga).. Perkembangan produktivitas hasil pertanian disajikan pada grafik berikut ini.

Grafik 1.



Kinerja bidang pertanian juga sangat dipengaruhi oleh luas lahan pertanian. Alih fungsi lahan pertanian di Kota Blitar tiap tahunnya sebesar 10 hektar digunakan untuk pembangunan perumahan dan prasarana umum lainnya. Maka hal tersebut perlu diimbangi dengan penerapan teknologi yang baik untuk terus mengoptimalkan lahan yang ada sehingga produktivitasnya tetap baik, seperti, penggunaan bibit unggul, irigasi yang baik, penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) secara tepat dan cepat sehingga bisa mempertahankan hasil produksi tetap baik. Selain itu perlu segera ditetapkan Kawasan

Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai jaminan akan keberlangsungan pemenuhan pangan pokok masyarakat di Kota Blitar.

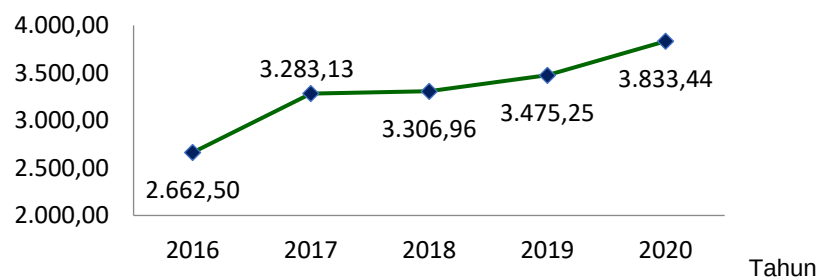
Kinerja bidang peternakan ditunjukkan dengan indikator jumlah produksi daging, telur dan susu. Berdasarkan 2.6 di atas, produksi daging dalam kurun waktu 2016–2020 mengalami peningkatan dari 3.748 ton/tahun pada tahun 2016 menjadi 3.844 ton/tahun di tahun 2020 atau meningkat rata-rata 0,67% per tahun. Sedangkan produksi susu naik dari 501.000 liter/tahun pada tahun 2016 menjadi 704.430 liter/tahun pada tahun 2020 atau rata-rata naik 9,25% per tahun. Produksi telur juga meningkat dari 2.662,50 ton/tahun pada tahun 2016 menjadi 3.833,44 ton/per tahun pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 9,85% per tahun. Peningkatan produksi hasil peternakan di dukung oleh 3 faktor yaitu peningkatan kesehatan hewan ternak, peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan penjaminan kesehatan dan keamanan Bahan Asal Hewan (BAH) serta pembinaan dan pendampingan kelompok ternak. Pada tahun 2020 telah dilakukan pelayanan terpadu kesehatan hewan di 19 lokasi dengan jumlah ternak yang terlayani mencapai 1942 ekor ternak ruminansia (sapi dan kambing). Pelayanan terpadu ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan ternak gratis terutama untuk ternak sapi dan kambing serta sebagai sarana pemberian sosialisasi/pembinaan tentang penyakit hewan menular. Dalam pemberian jaminan kesehatan dan keamanan bahan asal hewan telah dilakukan pemeriksaan sampel bahan asal hewan dari kemungkinan cemaran bahan berbahaya. Peningkatan kapasitas dan kapasitas peternak serta sosialisasi Kesehatan masyarakat veteriner dilakukan melalui sosialisasi kepada peternak dan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media publikasi lainnya (talk show radio, leaflet, banner). Pada bidang peternakan, terbatasnya produksi hasil peternakan juga sangat dipengaruhi oleh keterbatasan lahan. Untuk itu perlu upaya memaksimalkan hasil ternak yang ada diantaranya dengan peningkatan pengawasan dan layanan Kesehatan hewan yang dilakukan secara berkala, tepat dan cepat baik dalam pelayanan obat. Adapun permasalahan pengelolaan limbah yaitu kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah peternakan yang ramah lingkungan juga menjadi permasalahan tersendiri yang perlu dipikirkan solusi ke depan. Dalam rangka menyediakan kualitas hasil ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal, perlu penyediaan sarana dan prasarana peternakan yang memenuhi dan berstandar nasional (RPH dan RPHU) dengan menambah beberapa fasilitas yang masih dibutuhkan. Secara umum RPHU Kota Blitar sudah memenuhi standar

(bersertifikat NKV), untuk itu dengan penambahan fasilitas baik di RPHU maupun RPH akan semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pendampingan dan pembinaan kepada kelompok peternak di fokuskan pada kelompok ternak ruminansia dan kelompok olahan hasil ternak. Pendampingan dan pembinaan di utamakan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan terutama dalam manajemen budidaya yaitu pembuatan pakan secara mandiri, pengolahan dan pemanfaatan limbah ternak, serta demoplot pembesaran kambing PE, pelatihan ternak kelinci, dan bimtek penetasan telur ayam dan bebek. Sedangkan pada kelompok olahan hasil ternak difokuskan pada pelatihan dasar olahan hasil ternak yang berbahan baku susu. Selain itu guna mendukung peningkatan produksi hasil peternakan serta penjaminan kesehatan masyarakat veteriner dilakukan pembelajaran/ peningkatan pengetahuan baik untuk peternak maupun masyarakat melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi). Perkembangan produksi hasil peternakan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

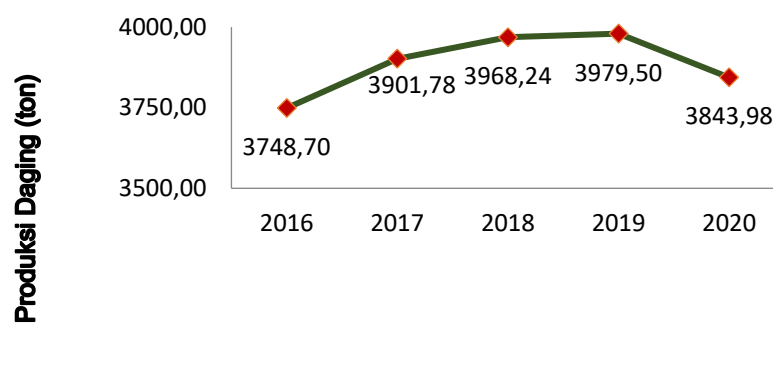
Grafik. 7

Grafik Perkembangan Produksi Telur Tahun 2016-2020



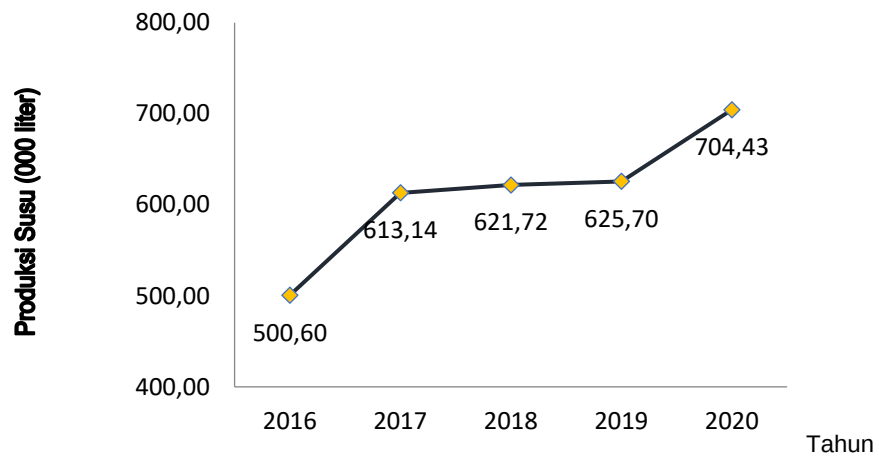
Grafik. 8

Grafik Perkembangan Produksi Daging Tahun 2016-2020



Grafik. 9

Grafik Perkembangan Produksi Susu Tahun 2016-2020



Tabel. 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar
Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Operasi	8.504.122.640,00	8.770.273.100,00	9.560.397.714,00	11.399.810.529,00	8.498.489.834,00	7.958.508.283,00	7.777.370.065,00	8.765.242.323,00	10.000.370.560,25	7.726.069.842,00	0,94	0,89	0,92	0,88	0,91	1,48%	0,44%
Belanja Modal	4.612.963.414,00	2.888.925.000,00	4.186.647.574,00	3.169.527.950,00	2.600.661.800,00	4.557.807.542,00	2.796.953.169,00	4.070.175.775,00	3.018.341.011,55	2.555.224.590,93	0,99	0,97	0,97	0,95	0,98	-8,67%	-8,57%
Jumlah Total Anggaran Belanja	13.117.086.054,00	11.659.198.100,00	13.747.045.288,00	14.569.338.479,00	11.099.151.634,00	12.516.315.825,00	10.574.323.234,00	12.835.418.098,00	13.018.711.571,80	10.281.294.432,93	0,95	0,91	0,93	0,89	0,93	-2,76%	-3,43%

Dari tabel diatas diketahui bahwa :

1. Tren jumlah anggaran total tahun 2016 – 2020 cenderung menurun. Hal ini menyesuaikan kebutuhan anggaran dan kompleksitas pekerjaan dalam pencapaian target kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar.
2. Tren realisasi anggaran secara total tahun 2016 – 2020 juga cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh efisiensi anggaran beberapa anggaran yang tidak dapat direalisasikan karena pandemi COVID-19.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar ke depan antara lain :

- Penanganan penduduk rawan pangan di Kota Blitar belum dapat dilakukan secara efektif.
- Penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan tidak memungkinkan adanya ekstensifikasi budidaya.
- Perdagangan bebas komoditas pertanian mensyaratkan adanya standarisasi produk untuk mampu bersaing.
- Berkembangnya era digital yang menuntut perubahan pola pengelolaan dan pengembangan sector pertanian mulai dari hilir sampai dengan hulu.
- Pengaruh iklim ekstrim terhadap penurunan produksi tanaman serta serangan berbagai hama penyakit tanaman, ternak dan ikan.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ke depan antara lain :

- Terjalannya hubungan yang baik antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar dengan instansi-instansi vertikal terkait.
- Terjalannya hubungan yang baik antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar dengan mitra kerja (petani, pelaku agribisnis, penyedia saprodi, dll.)
- Antusiasme petani terhadap perkembangan-perkembangan baru di bidang pertanian yang diakomodasi dalam program-program Dinas.

- Tanggapan positif petani terhadap isu pertanian berwawasan lingkungan dan isu peningkatan daya saing produk pertanian.
- Perkembangan teknologi yang pesat semakin mempermudah dan memperluas akses sector pertanian sampai dengan wilayah global.

3

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas meliputi urusan pangan, pertanian dan perikanan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan urusan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar disajikan pada berikut ini :

Tabel. 3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Urusan PD

Urusan	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pertanian	Belum terjaganya produktivitas pertanian	Produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura belum optimal	Belum optimalnya pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
			Ketersediaan sarana pertanian belum optimal
			Kapasitas SDM petani perlu ditingkatkan
			Metode budidaya berorientasi agribisnis belum diterapkan
			Pemasaran produk tanaman pangan dan hortikultura secara digital masih sangat kurang
			Belum adanya sentra produk pertanian secara fisik atau online
			Pasar tani belum efektif untuk mendukung pemasaran produk pertanian segar
	Belum optimalnya pengelolaan potensi peternakan	Sarana dan prasarana produksi peternakan belum optimal	Produksi hasil ternak perlu ditingkatkan
			Penanganan limbah ternak di tingkat peternak belum optimal
			Pendampingan unit usaha peternak dan hasil hewan ternak dalam proses sertifikasi halal dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) masih belum optimal
			Kurangnya penanganan penyakit hewan ternak
			Belum memiliki klinik/laboratorium Kesehatan hewan
			Masih kurangnya sarana penunjang Kesehatan hewan (mobil kesehatan hewan)

Urusan	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pangan	Belum optimalnya ketahanan pangan daerah	Pembangunan bidang ketahanan pangan perlu ditingkatkan	Produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan belum optimal
			Pencegahan masuk dan keluarnya pangan mengandung bahan berbahaya belum optimal
		Keanekaragaman konsumsi belum optimal	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi seimbang dan fokus pada pemenuhan kalori
			Diversifikasi beras belum dipraktekkan untuk konsumsi sehari-hari
Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produktivitas perikanan	Produksi dan pemasaran produk perikanan budidaya perlu ditingkatkan	Kapasitas SDM pembudidaya perikanan perlu ditingkatkan
			Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berbasis digital perlu ditingkatkan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi Kota Blitar 2021-2026 :

Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermatabat

b. Misi Kota Blitar 2021-2026 :

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
3. Meningkatkan Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital
4. Meningkatkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
5. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD terhadap Pencapaian Visi Misi
Walikota dan Wakil Walikota Blitar

Visi : Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermatabat				
No.	Misi Walikota & Wakil Walikota Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital	- Produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura belum optimal - Sarana dan prasarana produksi peternakan belum optimal - Pembangunan bidang ketahanan pangan perlu ditingkatkan - Keanekaragaman konsumsi belum optimal - Produksi dan pemasaran produk perikanan budidaya perlu ditingkatkan	- Penanganan urusan pangan belum optimal, sehingga kondisi ketahanan pangan belum mantap. - Luas lahan pertanian terus menurun akibat alih fungsi. - Ketersediaan sarana prasarana dan kapasitas SDM pertanian dan perikanan masih kurang. - Alih informasi dan alih teknologi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian kurang optimal.	- Telah diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang adanya bentuk kelembagaan yang lebih efektif untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pangan, perikanan dan pertanian - Telah dirintisnya regulasi tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. - Penerapan intensifikasi pertanian dan peningkatan kapasitas SDM pertanian dapat meningkatkan produktivitas tanaman, ikan maupun ternak meskipun pada lahan yang terbatas. - Perkembangan teknologi pengolahan pangan modern serta teknologi informasi memungkinkan peningkatan daya saing produk pertanian.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra K/L

1. Renstra Kementerian Pertanian RI Tahun 2020 - 2024 (PERMENTAN No. 259/Kpts/RC.020/M/05/2020):

Arah Kebijakan pembangunan pertanian dan pangan pada periode 2020 – 2024 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya dengan menitikberatkan kepada pembangunan pertanian menuju pertanian industri, dari system pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern sesuai dengan arahan Presiden agar melakukan transformasi ekonomi. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, sector pertanian diberikan mandat pada agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sebagai penerjemahan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, maka pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Memerhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Terjaganya ketahanan pangan nasional,
- b) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,
- c) Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
- d) Meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan
- e) Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Arah kebijakan tersebut dijelaskan melalui strategi dan upaya-upaya pelaksanaan melalui program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian Pertanian. Strategi yang dipilih untuk diterapkan diharapkan berdampak besar terhadap pencapaian

visi dan misi, tujuan serta sasaran strategis. Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Kegiatan mekanisasi juga meningkatkan kemampuan pertanian dalam menggarap lahan lebih luas bahkan bisa ekspansi ke luar wilayah pusat-pusat pertanian yang ada selama ini serta akan mendorong peningkatan produksi usaha tani melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian. Kegiatan mekanisasi pertanian perlu dilakukan dari industri hulu, onfarm, dan industri hilir sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha pertanian. Fokus strategi Kementerian Pertanian selanjutnya yaitu kegiatan *research and development (R&D)* dan inovasi pertanian yang lebih komprehensif lagi yang tidak hanya dilakukan dalam upaya peningkatan produktivitas (*yield*) tetapi perlu diprioritaskan kepada penciptaan teknologi dan inovasi untuk menurunkan biaya produksi, peningkatan kualitas dan menurunkan biaya distribusi dan pemasaran (biaya logistik). Apabila dijabarkan lebih lanjut dalam setiap arah kebijakan maka strategi dari masing-masing kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Strategi untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional

Kondisi yang dicapai dalam terjaganya ketahanan pangan adalah stabilnya pasokan pangan, akses pangan mudah dan murah serta distribusi pangan yang lancar. Strategi yang dilakukan adalah :

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian dengan meningkatkan penyediaan benih unggul; peningkatan penerapan praktik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil secara baik (*Good Agricultural Practices, Good Handling Practices* dan *Good Manufacturing Practices*); meningkatkan pengendalian hama dan penyakit tanaman; meningkatkan pengembangan Kawasan komoditas pertanian; meningkatkan pemanfaatan lahan secara optimal; meningkatkan populasi ternak; pengembangan system pertanian terpadu (tanaman-ternak).
- b. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional dengan penyediaan pangan yang berasal dari produksi domestic; memberdayakan usaha pangan skala kecil (*corporate farming*); mempercepat diseminasi teknologi; meningkatkan pemanfaatan teknologi pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan.

- c. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan dengan memperkuat pengembangan system distribusi; menjaga sabilitas pasokan pangan; merevitalisasi system kelembagaan lumbung pangan masyarakat menjadi system cadangan pangan masyarakat; mendukung penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat miskin dan kekurangan pangan; meningkatkan diversifikasi pangan dengan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
2. Strategi dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
Adapun startegi yang dilakukan untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian adalah sebagai berikut :
 - a. Peningkatan nilai tambah dengan pengembangan dan penanganan pasca panen melalui manajemen mutu sesuai permintaan pasar; penguatan unit-unit pengolahan, pascapanen dan pemasaran di tingkat kelompok; modernisasi pengolahan dan penyimpanan produk pertanian; pengembangan Kawasan komoditas pertanian berbasis korporasi petani, efisiensi tata niaga pertanian.
 - b. Peningkatan daya saing pertanian dengan Digitalisasi system informasi dan promosi serta perizinan ekspor dan investasi; meningkatkan volume pengembangan dan penguatan system karantina; percepatan Program I-Mace (*Indonesian Maps of Agriculture Commodity Export*); penerapan elektronik sertifikast produk pertanian; sinergitas dengan kementrian/Lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait lain untuk mendukung ekspor.
 3. Strategi dalam Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian serta Tersedianyan prasarana dan sarana Pertanian.
Kondisi yang ingin dicapai yaitu terkelolanya dengan baik lahan pertanian, pembiayaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian. Adapun strategi yang digunakan adalah :
 - a. Peningkatan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta peningkatan ketersediaan air.
 - b. Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaannya.
 - c. Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida.
 - d. Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (moderanisasi) pertanian.
 4. Strategi dalam Meningkatkan kualitas SDM Pertanian.

Peningkatan dan pengembangan SDM pertanian dalam pembangunan pertanian sangatlah diperlukan karena SDM yang andal dan professional menjadi salah satu factor kunci dalam membangun pertanian berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan adalah :

- a. Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian.
 - b. Regenerasi dan Penumpukan Minat Generasi Muda Pertanian.
 - c. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
 - d. Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional.
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi.
 - f. Penguatan kelembagaan petani.
5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima.

Tata Kelola pelayanan pemerintah yang baik (*good governance*) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan public termasuk menciptakan iklim yang kondusif untuk masuknya investasi dan tumbuh kembangnya dunia usaha melalui birokrasi yang efektif dan efisien. Adapun strategi yang digunakan adalah :

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis.
- c. Reformasi system akuntabilitas kinerja.
- d. Transformasi pelayanan publik.

2. Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2020-2024 (PERMEN-KP No. 17/PERMEN-KP/2020) :

Visi Kementerian Kelautan dan Pertanian Tahun 2020-2024 adalah terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong. Untuk mewujudkan visi tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 4 misi yaitu :

1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

3. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP

Arah Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan :

1. Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat.
2. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan Perikanan.

3.3.2. Telaahan Renstra Provinsi

1. Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 :

Tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur adalah meningkatkan nilai tambah produksi pertanian, kehutanan dan perikanan. Strategi dan arah kebijakan yang diterapkan agar tujuan tersebut dapat tercapai adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan nilai tambah produksi pertanian, kehutanan dan perikanan	1. Meningkatkan nilai tambah produksi pertanian, kehutanan dan perikanan 2. Meningkatkan nilai tambah produksi pertanian, kehutanan dan perikanan 3. Meningkatkan nilai tambah produksi pertanian, kehutanan dan perikanan	1. Meningkatkan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan masyarakat 2. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian 3. Meningkatkan produksi komoditas strategis (padi, jagung dan kedelai) 4. Meningkatkan produksi komoditas strategis (cabe rawit, bawang merah, manga, jeruk dan manggis) 5. Mengoptimalkan penerapan pengendalian hama terpadu 6. Meningkatkan ketersediaan benih tanaman pangan dan hortikultura yang bersertifikat 7. Peningkatan daya saing petani/keompok tani 8. Peningkatan sertifikasi dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan (PSAT) 9. Perbanyakan benih hortikultura berkualitas dan bersertifikat sesuai kebutuhan pasar 10. Peningkatan kualitas dan daya saing peorduk tanaman pangan dan hortikultura	1. Optimalisasi ketersediaan prasarana dan sarana pertanian 2. Intensifikasi dan penambahan luas tanam tanaman pangan 3. Pengembangan produk olahan 4. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang 5. Penerapan GAP dan penambahan luas tanam tanaman hortikultura 6. Meningkatkan nilai tambah tanaman pangan 7. Peningkatan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura 8. Meningkatkan kapasitas SDM non aparatur pertanian 9. Perbanyakan benih padi dan palawija bersertifikat sesuai kebutuhan pasar Jawa Timur 10. Pengembangan Teknologi Agribisnis Perbenihan Hortikultura 11. Pengembangan Teknologi Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

2. Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 :

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2019-2024 adalah Meningkatkan pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka strategi dan arah kebijakan yang diterapkan adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan	Meningkatnya nilai tambah sub kategori perikanan	Meningkatkan Produksi perikanan budidaya	Meningkatkan produksi perikanan budidaya di Jawa Timur
		Meningkatkan produksi perikanan tangkap	Meningkatkan produksi perikanan tangkap di Jawa Timur
			Meningkatkan Pendapatan
		Meningkatkan produksi olahan dan akses pasar	Meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan
		Meningkatkan pemanfaatan	Meningkatkan pemanfaatan ruang
		ruang laut sesuai zonasi dengan teknologi tepat guna	laut melalui kemitraan strategis dalam pengembangan dan penyebaran teknologi hasil kelautan dan perikanan
		Meningkatkan pelayanan pengujian mutu dan	Meningkatkan produk hasil perikanan yang bersertifikat mutu
		Meningkatkan produksi benih ikan air payau dan laut	Meningkatkan pelayanan pelaku usaha pembudidaya ikan Jawa Timur
		Meningkatkan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan	Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang terakses pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan
		Meningkatkan kompetensi pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan	Meningkatkan pelayanan pelatihan teknis pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan di Jawa Timur

Tujuan	Sasaran	Startegi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan luasan rehabilitasi ekosistem kelautan dan perikanan	Mengendalikan sumber daya kelautan dan perikanan
		Meningkatkan pelayanan pelabuhan	Meningkatkan pelayanan pelabuhan perikanan di Jawa Timur
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat	Meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN	Meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN Dinas Kelautan dan Perikanan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Strategi pengembangan kegiatan pertanian perkotaan sesuai Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 meliputi :

- a. meningkatkan dan mengembangkan kawasan agrowisata di bagian selatan kota;
- b. meningkatkan sarana dan prasarana pertanian;
- c. mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang menjadi potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- d. mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan kawasan pertanian perkotaan.

Rencana kawasan pertanian terdiri atas lahan sawah dan lahan bukan sawah, dengan rincian :

1. Luas lahan sawah sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf a kurang lebih 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) Ha meliputi :
 - a. Kecamatan Kepanjenkidul dengan luas kurang lebih 247 (dua ratus empat puluh tujuh) Ha;
 - b. Kecamatan Sananwetan dengan luas kurang lebih 244 (dua ratus empat puluh empat) Ha; dan
 - c. Kecamatan Sukorejo dengan luas kurang lebih 186 (seratus delapan puluh enam) Ha.

Lahan sawah tersebut ditetapkan sebagai kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

2. Luas lahan bukan sawah sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf b kurang lebih 138 (seratus tiga puluh delapan) Ha meliputi:
 - a. Kecamatan Kepanjenkidul dengan luas kurang lebih 56 (lima puluh enam) Ha;
 - b. Kecamatan Sananwetan dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) Ha; dan
 - c. Kecamatan Sukorejo dengan luas kurang lebih 32 (tiga puluh dua) Ha.

Lahan bukan sawah ditetapkan sebagai lahan cadangan pengembangan lahan terbangun.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Blitar tahun 2021-2026 terbagi dalam 4 pilar (ekonomi, lingkungan, social, dan tata kelola) dan terdiri dari 14 Tema Besar Isu Strategis. Dalam tema besar Alih Fungsi Lahan terdiri dari isu strategis :

1. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali
2. Ruang terbuka hijau semakin terkikis
3. Isu perubahan fungsi lahan pertanian (pembangunan sarana perdagangan dan jasa)

Alih fungsi lahan pertanian sebagian besar berubah menjadi kawasan pemukiman. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah penduduk setiap tahun sehingga terjadi peningkatan pemenuhan kebutuhan papan atau tempat tinggal dengan bertambahnya pembangunan pemukiman baru. Kondisi luas lahan pertanian semakin menurun dan berbanding terbalik dengan luas lahan non pertanian (Kawasan pemukiman) yang semakin meningkat. Luas lahan pertanian yang semakin menurun mempengaruhi jumlah produksi padi sawah dimana selama 3 (tiga) tahun terakhir produksi padi sawah mengalami penurunan. Penurunan lahan pertanian dari tahun 2015 sampai dengan 2018 sebesar 108,88 ha atau rata-rata 27,22 ha setiap tahunnya. Dampak yang ditimbulkan dari perubahan tata guna lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian adalah menurunnya kemampuan produksi pangan seiring semakin sempitnya lahan pertanian milik warga sedangkan teknologi pertanian tidak mengalami perubahan, dan keberlangsungan ketersediaan lahan pertanian. Sehingga dengan adanya penurunan luas lahan pertanian memberikan dampak terhadap produksi sector pertanian.

Sedangkan dalam tema besar Ketahanan Pangan terdiri dari isu strategis :

1. Ketergantungan bahan pangan dari luar daerah yang masih besar
2. Belum optimalnya insfrastruktur pertanian

3. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai dan tingkat konsumsi ikan
4. Potensi menurunnya produksi pertanian

Ketahanan pangan menjadi kondisi yang sangat penting dan darurat untuk diperhatikan. Kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengancam kondisi ketahanan pangan masyarakat. Tantangan mengenai ketahanan pangan yang harus dihadapi yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas sumber pangan masyarakat. Isu strategis peningkatan ketahanan pangan produktivitas hasil pertanian, peternakan, perikanan darat, ditekankan pada diversifikasi pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan darat berbasis teknologi tepat. Aspek yang dipenuhi (1) ketersediaan, kecukupan, stabilitas, aksesibilitas, kualitas, kuantitas, keterjangkauan serta keamanan pangan secara berkesinambungan; (2) mengamankan stok cadangan pangan dan pengendalian harga daerah. Indikasi ketahanan pangan mencakup produksi dalam negeri dari hasil tanaman padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi dan produksi perikanan. Isu strategis bidang energi adalah ketepatan distribusi dan stabilitas harga bahan bakar/energi, terutama LPG 3 kg.

Rekomendasi program yang terdapat dalam KLHS Tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penanganan Kerawanan Pangan
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan antara lain :

- a. Gambaran pelayanan PD.
- b. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga terkait.
- c. Sasaran jangka menengah pada Renstra PD Provinsi.
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD.
- e. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD.

Terwujudnya pemantapan kedaulatan pangan merupakan salah satu cara dalam menghadapi persoalan ancaman kerawanan pangan dunia yang berkaitan sangat erat dengan pertumbuhan penduduk juga sensitif terhadap perubahan iklim global. Ketidak

stabilan ketahanan pangan, cenderung memicu terjadinya ketidakstabilan ekonomi maupun gejolak politik. Dalam hal ini, krisis pangan akan terjadi manakala tidak ada upaya – upaya yang serius untuk memperbaiki struktur produksi pangan.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, isu-isu strategis yang mendesak untuk ditangani oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah :

1. Belum optimalnya produktivitas pertanian dalam arti luas (proses kegiatan agribisnis pertanian, peternakan dari hulu sampai hilir)
2. Belum optimalnya produktivitas perikanan dalam arti luas (proses kegiatan agribisnis perikanan dari hulu sampai hilir)
3. Keberagaman/diversifikasi konsumsi pangan masyarakat masih kurang

4

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam RENSTRA PD ini terdapat 3 (tiga) pernyataan tujuan yang mengacu pada Sasaran dalam RPJMD Kota Blitar. Sasaran RENSTRA merupakan penjabaran atau implementasi dari Tujuan RENSTRA, dan Indikatornya menjadi Indikator Sasaran Strategis selama Tahun 2021-2026. Dalam RENSTRA PD ini terdapat 5 (lima) pernyataan Sasaran. Gambaran mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut :

Tabel. 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tahun 2026	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/Definisi Operasional	Target Capaian				
						2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	76,18			Pembobotan 9 (Sembilan) indikator turunan dari 3 (tiga) aspek ketahanan (ketersediaan , keterjangkauan, pemanfaatan pangan) yang dibagi dalam 6 (enam) kategori kelompok wilayah yang menggambarkan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah (zona hijau menandakan wilayah dengan tingkat ketahanan pangan yang paling baik). IKP dihitung oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional.	74,18	74,68	75,18	75,68	76,18
			Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor PPH ideal = 100	86,25	86,5	86,75	87	88,5
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	A			Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	84,7 (A)	84,71 (A)	84,73 (A)	84,75 (A)	84,77 (A)
			Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	84,7 (A)	84,71 (A)	84,73 (A)	84,75 (A)	84,77 (A)

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tahun 2026	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Target Capaian				
						2022	2023	2024	2025	2026
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (milyar rupiah)	200,79			Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (dalam miliar) yang dikeluarkan oleh BPS Kota Blitar	196,82	197,81	198,80	199,79	200,79
			Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (dalam kwintal)	Jumlah total produksi tanaman pangan dan hortikultura dalam 1 tahun (kwintal)	198.186,93	198.206,74	198.325,67	198.444,66	198.563,73
			Terjaganya produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan (dalam kwintal)	Jumlah total produksi hasil peternakan (telur, susu, daging) dalam 1 tahun (kwintal).	84321,66	84651,19	84827,72	85042,36	85356,30
			Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi (dalam kwintal)	Jumlah total produksi ikan konsumsi dalam 1 tahun (kwintal)	2.404,80	2.464,92	2.489,33	2.519,10	2.549,33
				Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias (ekor)	Jumlah total produksi ikan hias (ekor) dalam 1 tahun	4.698.482	4.719.625	4.740.863	4.762.197	4.783.627
				Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan	Rata-rata ((nilai output (Rp/Kg)- Sumbangan input lain (Rp/kg)-Harga bahan baku (Rp/kg))/ Nilai output x 100%)	30,6	31,20	31,80	32,40	33,00

5

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran strategis akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana PD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder layanan. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi juga merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian disusun melalui analisis masalah dari isu sektoral maupun isu strategis dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Rumusan strategi diambil dari hasil indentifikasi masalah yang merupakan penyebab makro dari masalah pokok (isu strategis) dimana pemecahan masalah tersebut diterjemahkan menjadi strategi dalam renstra. Sedangkan rumusan arah kebijakan diambil dari identifikasi akar masalah yang merupakan penyebab dari masalah yang lebih rinci dimana pemecahannya diterjemahkan menjadi arah kebijakan dalam renstra.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 52 menyatakan bahwa arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan

untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar pada periode lima tahun mendatang disajikan pada tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi :	Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermatabat			
Misi 3:	Meningkatkan Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital			
Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Belum optimalnya keberagaman/ diversifikasi konsumsi pangan masyarakat	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Peningkatan pembangunan bidang ketahanan pangan	Optimalisasi produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan
				Optimalisasi pencegahan masuk dan keluarnya pangan mengandung bahan berbahaya
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Peningkatan kinerja pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah berbasis kinerja
				Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif
Belum optimalnya produktivitas pertanian dalam arti luas	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	Meningkatnya produksi komoditas hasil pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura	Peningkatan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
				Peningkatan pengendalian Organisme pengganggu tanaman OPT
				Peningkatan ketersediaan sarana pertanian
				Peningkatan kapasitas SDM petani
				Penerapan metode budidaya berorientasi agribisnis
				Peningkatan pemasaran produk tanaman pangan dan hortikultura secara digital
		Meningkatnya produksi komoditas hasil peternakan	Peningkatan sarana dan prasarana produksi peternakan	Peningkatan pengawasan produksi hasil peternakan ternak
				Peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak
			Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	Peningkatan pengawasan produksi hasil peternakan ternak
				Peningkatan pendampingan unit usaha peternak dan hasil hewan ternak dalam proses sertifikasi halal dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
Belum optimalnya produktivitas perikanan dalam arti luas		Meningkatnya produksi komoditas hasil perikanan	Peningkatan produksi dan pemasaran produk perikanan budidaya	Peningkatan penanganan penyakit hewan ternak
				Peningkatan pengawasan produksi hasil peternakan ternak
				Peningkatan kapasitas SDM pembudidaya perikanan
				Peningkatan pemenuhan benih ikan
				Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berbasis digital

6

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar menetapkan program – program yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021-2026 disajikan dalam Tabel 6.1 dan 6.2 berikut ini.

Tabel. 6.1
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2022
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DAERAH KOTA BLITAR

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2022			
								Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah				Nilai SAKIP PD	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	angka	83,92	84,7	7.775.404.953	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Meningkatnya Kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP PD	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	angka	83,92	84,7	7.775.404.953	Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	80,25	80,75	7.775.404.953	Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	(jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar / jml. Dokumen perencanaan dan pelaoran yang tersusun) x 100%	%	100	100	93.543.400		
		2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan PD	Jumlah jenis dokumen perencanaan PD dalam 1 tahun	dokumen	8	8	9.642.000		
		2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi perangkat daerah dalam 1 tahun	dokumen	7	7	83.901.400		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2022			
								Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	(jumlah pelayanan administrasi keuangan yang sesuai standar / jml. Total pelayanan administrasi keuangan daerah) x 100%	%	100	100	6.259.769.055		
		2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan dalam 1 tahun	pegawai	52	58	6.257.113.855		
		2.09.01.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan bulanan/ semesteran yang disusun	Jumlah jenis laporan keuangan bulanan/ semesteran yang disusun dalam 1 tahun	dokumen	2	2	2.655.200		
		2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	(jumlah pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar / jml. Total pelayanan administrasi kepegawaian daerah) x 100%	%	100	100	87.157.150		
		2.09.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti dalam 1 tahun	event	1	3	87.157.150		
				Jumlah publikasi kegiatan dinas di media cetak	Jumlah publikasi kegiatan dinas di media cetak dalam 1 tahun	publikasi	2	2			
		2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	(jumlah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar / jml. Total ketersediaan administrasi umum perangkat daerah daerah) x 100%	%	100	100	582.154.940		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2022			
								Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang tersedia	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang tersedia dalam 1 tahun	jenis	5	13	9.206.500		
		2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dalam 1 tahun	unit	2	5	203.272.100		
		2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia dalam 1 tahun	jenis	49	49	100.077.940		
		2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia dalam 1 tahun	dos	320	554	57.709.400		
				Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun	jenis	41	45			
		2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Jumlah barang cetakan yang tersedia dalam 1 tahun	jenis	6	5	33.201.200		
				Jumlah lembar penggandaan	Jumlah lembar penggandaan dalam 1 tahun	lembar	9000	16650			
		2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan yang tersedia dalam 1 tahun	jenis	20	3	14.280.000		
		2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti dalam 1 tahun	rakor	37	82	164.407.800		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2022			
								Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	(jumlah ketersediaan jasa penunjang urusan yang sesuai standar / jml. Total ketersediaan jasa penunjang urusan) x 100%	%	100	100	150.093.408		
		2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	Jumlah rekening yang terbayarkan dalam 1 tahun	rekening	18	18	150.093.408		
		2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	(jumlah BMD yang terpelihara yang sesuai standar dalam 1 tahun / jml. Total pemeliharaan BMD dalam 1 tahun) x 100%	%	100	100	602.687.000		
		2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas di bayarkan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas di bayarkan perizinannya dalam 1 tahun	unit	41	41	147.008.700		
		2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dalam 1 tahun	unit	35	42	24.022.300		
		2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara dalam 1 tahun	unit	0	2	389.668.800		
		2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara dalam 1 tahun	unit	25	75	41.987.200		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2022			
								Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya ketahanan pangan daerah				Indeks Ketahanan Pangan	Pembobotan 9 (Sembilan) indikator turunan dari 3 (tiga) aspek ketahanan (ketersediaan , keterjangkauan, pemanfaatan pangan) yang dibagi dalam 6 (enam) kategori kelompok wilayah yang menggambarkan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah (zona hijau menandakan wilayah dengan tingkat ketahanan pangan yang paling baik). IKP dihitung oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional.	angka	73,38	74,18	254.387.060	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kota Blitar
	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor PPH ideal = 100	angka	85,25	86,25	254.387.060	Bidang KP & Perikanan	Kota Blitar
		3.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka konsumsi energi per kapita	Angka konsumsi energi per kapita (kkal/ kapita/ hari)	(kkal/ kapita/ hari)	2225	1971	174.387.060	Bidang KP & Perikanan	Kota Blitar
				Angka ketersediaan energi perkapita/ hari	Angka ketersediaan energi perkapita/ hari	(kkal/ kapita /hari)	2200	2200			
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Nilai capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	Angka		84	84	22.281.000		
					Rata-rata dari nilai ketersediaan informasi berdasarkan komoditas (K1), nilai ketersediaan informasi berdasarkan lokasi (K2) dan nilai ketersediaan informasi berdasarkan waktu (K3) (Permentan No. 65 Tahun 2010)						
					$K_1 = \frac{\sum_{j=1}^I \frac{Re\; aktual\; (j)}{T\; ang\; at\; (j)} \times 100\; \%}{3}$ $K_2 = \frac{\sum_{i=1}^I K_i}{3}$						
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun	Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun dalam 1 tahun	dokumen	1	1	2.820.400				
		Jumlah dokumen pendataan cadangan pangan	Jumlah dokumen pendataan cadangan pangan dalam 1 tahun	dokumen	1	1					
		Jumlah laporan pemantauan harga pangan	Jumlah laporan pemantauan harga pangan dalam 1 tahun	dokumen	1	12					

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2022			
								Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Frekuensi fasilitasi pasar tani	Frekuensi fasilitasi pasar tani dalam 1 tahun	kali	3	12	19.460.600		
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka konsumsi protein (gr/kapita/ tahun)	Angka konsumsi protein (gr/kapita/ hari)	(gr/ kapita/ hari)	86	57	152.106.060		
		2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok peserta pemberdayaan pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Jumlah kelompok peserta pemberdayaan pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam 1 tahun	kelompok	75	75	99.999.160		
				Jumlah partisipasi keg. Lomba Cipta Menu/kreasi masakan tingkat regional	Jumlah partisipasi keg. Lomba Cipta Menu/kreasi masakan tingkat regional dalam 1 tahun	orang	0	1			
				Jumlah pelaksanaan lomba KRPL	Jumlah pelaksanaan lomba KRPL dalam 1 tahun	kali	1	1			
				Jumlah peserta penyuluhan/ pelatihan pangan B2SAH	Jumlah peserta penyuluhan/ pelatihan pangan B2SAH dalam 1 tahun	orang	0	90			
		2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen analisis konsumsi pangan yang tersusun	Jumlah dokumen analisis konsumsi pangan yang tersusun dalam 1 tahun	dokumen	1	1	52.106.900		
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase balita rawan pangan yang tertangani	(jumlah balita rawan pangan yang diintervensi / jumlah total balita rawan pangan) x 100 %	%	12,12	13,17	68.000.000	Bidang KP & Perikanan	Kota Blitar
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis intervensi balita rawan pangan	Jumlah jenis intervensi balita rawan pangan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kali	2	2	68.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2022			
								Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.09.04.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) yang tersusun	Jumlah dokumen sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) yang tersusun dalam 1 tahun	dokumen	12	12	68.000.000		
			Jumlah penerima tambahan gizi untuk balita gizi kurang	Jumlah penerima tambahan gizi untuk balita gizi kurang dalam 1 tahun	anak	100	100				
			Jumlah peserta pembinaan penanganan rawan pangan	Jumlah peserta pembinaan penanganan rawan pangan dalam 1 tahun	orang	100	100				
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan segar (%)	(jumlah sampel pangan yang diuji dan dinyatakan aman / jumlah total sampel pangan segar yang diuji) x 100%	%	100	100	12.000.000	Bidang KP & Perikanan	Kota Blitar
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis sampel pangan segar yang diuji	(jumlah jenis sampel pangan segar yang diuji / jumlah total jenis sampel pangan segar yang harus diuji) x 100%	%	30	33	12.000.000		
		2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pengujian pangan segar	Jumlah sampel pengujian pangan segar dalam 1 tahun	sampel	10	15	12.000.000		
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan				PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (dalam miliar) yang dikeluarkan oleh BPS Kota Blitar	milyar rupiah	195,65	196,82	4.129.597.722	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kota Blitar
	Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya			Produksi hasil budidaya ikan konsumsi	Jumlah total produksi ikan konsumsi dalam 1 tahun	kwintal	2310,3	2.404,80	442.688.090	Bidang KP & Perikanan	Kota Blitar
				Produksi hasil budidaya ikan hias	Jumlah total produksi ikan hias dalam 1 tahun	ekor	4.563.416	4.698.482,45			
				Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan	Rata-rata ((nilai output (Rp/Kg)-Sumbangan input lain (Rp/kg)-Harga bahan baku (Rp/kg))/ Nilai output x 100%)	%	N/A	30,6			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2022			
								Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis	(Jml. Kelompok budidaya ikan konsumsi, ikan hias dan UPR yang telah memenuhi rekomendasi standar teknis CPIB,CBIB, CPPIB / jml. Total kelompok budidaya ikan konsumsi dan UPR) x 100%	%	60,27	1,59	320.045.590	Bidang KP & Perikanan	Kota Blitar
				Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas	(jumlah benih ikan yang tersedia sesuai rekomendasi (CPIB) / jumlah produksi benih ikan) x 100%	%	13,67	14,35			
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan/ pelatihan/ pendampingan pengelolaan pembudidayaan ikan	(jumlah pembudidaya yang mendapatkan pendampingan/ pembinaan teknis pengelolaan pembudidayaan ikan / jumlah total pembudidaya ikan) x 100%	%	20	26,71	105.983.090		
		3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah jenis promosi pemasaran ikan hias	Jumlah jenis promosi pemasaran ikan hias dalam 1 tahun	jenis	0	2	70.983.100		
		3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta pelatihan/bimtek peningkatan mutu usaha budidaya perikanan	Jumlah peserta pelatihan/bimtek peningkatan mutu usaha budidaya perikanan dalam 1 tahun	orang	50	30	34.999.990		
				Jumlah peserta pelatihan/bimtek budidaya ikan	Jumlah peserta pelatihan/bimtek budidaya ikan dalam 1 tahun	orang	0	60			
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pembudidaya ikan yang memenuhi standrat mutu budidaya perikanan	(jumlah pembudidaya yang memenuhi standrat mutu budidaya perikanan / jumlah total pembudidaya ikan) x 100%	%	0	0,89	214.062.500		
		3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendataan perikanan	Jumlah dokumen pendataan perikanan dalam 1 tahun	dokumen	1	1	4.999.900		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2022			
								Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis sarana dan prasarana perikanan yang tersedia	Jumlah jenis sarana dan prasarana perikanan yang tersedia dalam 1 tahun	jenis	0	0	167.599,400		UPT Budidaya Perikanan Air Payau
				Jumlah jenis sarpras operasional BBI dan PIAIH yang tersedia	Jumlah jenis sarpras operasional BBI dan PIAIH yang tersedia dalam 1 tahun	jenis	3	7			
		3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pelaksanaan keskanling	Jumlah lokasi pelaksanaan keskanling dalam 1 tahun	lokasi	0	12	23.663,300		
		3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah peserta pembinaan teknis budidaya perikanan	Jumlah peserta pembinaan teknis budidaya perikanan dalam 1 tahun	orang	0	100	17.799,900		
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume penjualan hasil olahan perikanan (juta rupiah)	Jumlah penjualan hasil olahan perikanan tahun n	Juta rupiah	1066,5	33.891	122.642.500	Bidang KP & Perikanan	Kota Blitar
		3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pelaku usaha olahan hasil perikanan yang sudah memenuhi standar mutu	(jumlah pelaku usaha olahan hasil perikanan yang sudah memenuhi standar / jumlah total pelaku usaha olahan perikanan) x 100%	%	8,5	8,7	41.627,200		
		3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dibina	Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dibina dalam 1 tahun	Kelompok	10	10	41.627,200		
				Jumlah peserta pelatihan/ bimtek pengolahan hasil perikanan	Jumlah peserta pelatihan/ bimtek pengolahan hasil perikanan dalam 1 tahun	orang	30	60			
				Jumlah peserta pelatihan/ bimtek pemasaran hasil perikanan	Jumlah peserta pelatihan/ bimtek pemasaran hasil perikanan dalam 1 tahun	orang	0	30			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2022			
								Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka konsumsi ikan perkapita/ tahun	Angka konsumsi ikan perkapita/ tahun (kg/kapita/ tahun)	(kg/ kapita/tahun)	17,5	18	81.015.300		
		3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi lomba masak ikan TK. Regional	Jumlah fasilitasi lomba masak ikan TK. Regional dalam 1 tahun	event	0	1	81.015.300		
				Jumlah jenis sosialisasi gerakan makan ikan	Jumlah jenis sosialisasi gerakan makan ikan dalam 1 tahun	event	1	2			
				Jumlah jenis promosi/ pemasaran produk olahan hasil ikan	Jumlah jenis promosi/ pemasaran produk olahan hasil ikan dalam 1 tahun	event	0	1			
				Jumlah dokumen laporan konsumsi ikan yang tersusun	Jumlah dokumen laporan konsumsi ikan yang tersusun dalam 1 tahun	dokumen	1	1			
	Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura			Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (dalam kwintal)	Jumlah total produksi tanaman pangan dan hortikultura dalam 1 tahun	kwintal	197.890	198.186,93	2.754.472.910	Bidang TPHP	Kota Blitar
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang tersedia	(Jumlah sarana pertanian yang sudah tersedia/ Jumlah total kebutuhan sarana pertanian) x 100%	%	60	71	172.552.600	Bidang TPHP	Kota Blitar
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	(jumlah kelompok tani tanaman pangan horti yang dimonev / jumlah total kelompok pangan horti) x 100%	%	10	20	172.552.600		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2022			
								Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah dokumen RDKK yang tersusun	Jumlah dokumen RDKK yang tersusun dalam 1 tahun	dokumen	21	21	85.884.900		
				Jumlah pelaksanaan pengawasan, verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi	Jumlah pelaksanaan pengawasan, verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dalam 1 tahun	kali	12	12			
				Jumlah poktan tanaman pangan horti yang dimonev ketersediaan sarana pendukung pertanian	Jumlah poktan tanaman pangan horti yang dimonev ketersediaan sarana pendukung pertanian dalam 1 tahun	Kelom pok	0	14			
		3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah penyediaan sarana operasional kebun edukasi pertanian	Jumlah penyediaan sarana operasional kebun edukasi pertanian dalam 1 tahun	jenis	2	2	86.667.700		
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik	(Jumlah prasarana yang tersedia dalam kondisi baik / Jumlah kebutuhan prasarana) x 100%	%	40	50,88	2.184.716.700	Bidang TPHP	Kota Blitar
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase data dukung Raperda LP2B yang tersedia	(Jumlah data dukung yang sudah tersedia / jumlah data dukung yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) x 100%	%	25	75	82.085.700		
		3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B	Jumlah dokumen pendataan LP2B	Jumlah dokumen pendataan LP2B dalam 1 tahun	dokumen	1	1	76.609.900		
		3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah peserta rakor mutasi lahan pertanian	Jumlah peserta rakor mutasi lahan pertanian dalam 1 tahun	orang	30	30	5.475.800		
				Jumlah peserta rakor/ sosialisasi Persiapan LP2B Kota Blitar	Jumlah peserta rakor/ sosialisasi Persiapan LP2B Kota Blitar dalam 1 tahun	orang	0	30			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2022			
								Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang tersedia	((Jumlah JITUT tersedia + Jumlah JUT/JP tersedia + Jumlah Longstorage tersedia + Jumlah Pintu Air tersedia + Jumlah BPP tersedia) : (Jumlah kebutuhan JITUT + Jumlah kebutuhan JUT/JP + Jumlah kebutuhan Longstorage + Jumlah kebutuhan pintu air + Jumlah kebutuhan BPP)) X 100%	%	60,5	69,18	2.102.631.000		
		3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Panjang JITUT yang terbangun dan terpelihara	Panjang JITUT yang terbangun dan terpelihara dalam 1 tahun	m	1092,1	450	752.448.000		
		3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang JUT yang terbangun dan terpelihara	Panjang JUT yang terbangun dan terpelihara dalam 1 tahun	m	142	500	900.000.000		
		3.27.03.2.02.05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah longstorage yang terbangun dan terpelihara	Jumlah longstorage yang terbangun dan terpelihara dalam 1 tahun	unit	1	1	246.400.000		
		3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air yang terbangun dan terpelihara	Jumlah pintu air yang terbangun dan terpelihara dalam 1 tahun	unit	0	8	194.560.000		
		3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah sarana & prasarana Balai Penyuluhan kecamatan yang tersdia dan terpelihara	Jumlah sarana & prasarana Balai Penyuluhan kecamatan yang tersdia dan terpelihara dalam 1 tahun	unit	3	1	9.223.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2022			
								Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur	(Luas serangan OPT yang ditangani sesuai prosedur / Luas kejadian serangan OPT) x 100% Sesuai prosedur = sesuai SOP	%	100	100	91.490.000	Bidang TPHP	Kota Blitar
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan bahan pengendalian OPT	(Jumlah bahan pengendalian OPT yang tersedia / jumlah kebutuhan bahan pengendalian OPT) x 100%	%	13	13	91.490.000		
		3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah penyediaan bahan pengendalian OPT tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah penyediaan bahan pengendalian OPT tanaman pangan dan hortikultura dalam 1 tahun	jenis		6	91.490.000		
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis	(Jumlah usaha hasil pertanian yang sudah memenuhi rekomendasi persyaratan teknis / Jumlah total usaha hasil pertanian) x 100%	%	0	25	68.043.500	Bidang TPHP	Kota Blitar
		3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pertanian yang memenuhi standar teknis	Jumlah pelaku usaha pertanian yang memenuhi standar teknis sd. Tahun berjalan	unit	0	10	68.043.500		
		3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah pendampingan usaha pertanian	Jumlah pendampingan usaha pertanian dalam 1 tahun	kali	0	5	68.043.500		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
								2022					
								Kinerja	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani	(Rata-rata nlai kelas kelompok tahun n - jumlah rata-rata nilai kelas kelompok tahun n-1 / rata-rata nilai kelas kelompok tahun n-1) x 100%	%	0,73	0,93	237.670.110	Bidang TPHP	Kota Blitar		
				Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis	(jumlah kelompok tani yang telah menerapkan metode budidaya agribisnis / jumlah total kelompok tani) x 100%	%	0	4,76					
				Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital	(jumlah produk segar/olahan tanaman pangan dan hortikultura yang sudah dipasarkan secara digital / jumlah total produk segar/olahan tanaman pangan dan hortikultura) x 100%	%	0	22,22					
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase petani yang menerima peningkatan kapasitas SDM	Jumlah petani yang menerima pelatihan/ bimtek/ workshop / jumlah total petani yang terdaftar dalam kelompok tani x 100%	%	15	30	237.670.110				
		3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah dokumen programma penyuluhan pertanian yang tersusun	Jumlah dokumen programma penyuluhan pertanian yang tersusun dalam 1 tahun	dokumen	25	25	54.942.510				
		3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah dokumen penilaian kelas kelompok tani	Jumlah dokumen penilaian kelas kelompok tani dalam 1 tahun	dokumen	1	1	177.744.900				
				Jumlah peserta pelatihan/ workshop/ bintek pertanian	Jumlah peserta pelatihan/ workshop/ bintek pertanian dalam 1 tahun	orang	0	95					
				Jumlah peserta pembinaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)	Jumlah peserta pembinaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dalam 1 tahun	orang	0	270					

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2022			
								Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah peserta pembinaan kelompok Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	Jumlah peserta pembinaan kelompok Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dalam 1 tahun	orang	0	40			
				Jumlah peserta pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT)	Jumlah peserta pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam 1 tahun	orang	0	120			
		3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyediaan sarana operasional penyuluhan	Jumlah penyediaan sarana operasional penyuluhan dalam 1 tahun	jenis	0	1	4.982.700		
	Terjaganya produksi hasil peternakan			Produksi hasil peternakan	Jumlah total produksi hasil peternakan (telur, susu, daging) dalam 1 tahun	Kwintal	83.818	84321,66	932.436.722	Bidang Peternakan	Kota Blitar
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak	(jumlah usaha peternakan yang telah melakukan penanganan limbah tahun n - n-1 / jumlah total usaha peternakan n-1) x 100%	%	12,96	16,67	273.017.700	Bidang Peternakan	Kota Blitar
				Persentase pelaku usaha obat hewan yang sesuai standar)	(jumlah pelaku usaha obat hewan yang memenuhi persyaratan teknis / jumlah total pelaku usaha obat hewan) x 100%	%	9,68	16,13			
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang dibina	Jumlah peternakan yang mendapat pembinaan dalam 1 tahun / jumlah total peternak x 100%	%	10	13	142.836.400		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2022			
								Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan dalam 1 tahun	jenis	1	2	142.836.400		
				Jumlah peserta pelatihan/ bimtek budidaya ternak	Jumlah peserta pelatihan/ bimtek budidaya ternak dalam 1 tahun	orang	30	60			
				Jumlah peserta pembinaan dan pendampingan kelompok peternak	Jumlah peserta pembinaan dan pendampingan kelompok peternak dalam 1 tahun	orang	30	40			
		3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan penggunaan pakan ternak yang sesuai standar	(jumlah pelaku usaha peternakan yang menggunakan/ mengedarkan pakan ternak sesuai standar / jumlah total pelaku usaha peternakan) x 100%	%	100	100	73.667.100		
		3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah sampel pakan ternak yang teruji kualitasnya	Jumlah sampel pakan ternak yang teruji kualitasnya dalam 1 tahun	sampel	0	10	73.667.100		
				Jumlah pupuk limbah ternak yang teruji kualitasnya	Jumlah pupuk limbah ternak yang teruji kualitasnya dalam 1 tahun	sampel	0	10			
				Jumlah peserta pelatihan/bimtek pembuatan pakan ternak	Jumlah peserta pelatihan/bimtek pembuatan pakan ternak dalam 1 tahun	orang	30	60			
				Jumlah peserta pembinaan pengelolaan limbah ternak	Jumlah peserta pembinaan pengelolaan limbah ternak dalam 1 tahun	orang	0	30			
				Jumlah dokumen pendataan peredaran pakan ternak	Jumlah dokumen pendataan peredaran pakan ternak dalam 1 tahun	dokumen	1	1			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2022			
								Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase penyediaan benih/bibit ternak untuk demplot	(jumlah bibit ternak demplot yang tersedia / jumlah total kebutuhan bibit ternak) x 100 %	%	100	100	51.366.500		
		3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah demplot ternak	Jumlah demplot ternak dalam 1 tahun	Dem plot	0	1	51.366.500		
		3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase obat hewan yang sudah teregister	(jumlah jenis obat hewan yang teregister / jumlah jenis total obat hewan) x 100%	%	20	50	5.147.700		
		3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah peserta KIE keamanan peredaran obat hewan ke masyarakat	Jumlah peserta KIE keamanan peredaran obat hewan ke masyarakat dalam 1 tahun	orang	20	30	5.147.700		
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PETANIAN	Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)	(Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang lulus pemeriksaan antemortem, postmortem : Jumlah total hewan yang dipotong di RPH) X 100%	%	100	100	327.364.500	Bidang Peternakan	UPT RPH
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana RPH yang ditingkatkan	(jumlah prasarana RPH yang tersedia dan dalam kondisi baik / jumlah kebutuhan prasarana RPH) x 100%	%	30	50	327.364.500		
		3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah jenis prasarana RPH yang tersedia dan terpelihara	Jumlah jenis prasarana RPH yang tersedia dan terpelihara dalam 1 tahun	jenis	2	2	327.364.500		
Jumlah jenis sarana operasional RPH yang tersedia	Jumlah jenis sarana operasional RPH yang tersedia dalam 1 tahun			jenis	3	3					

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2022			
								Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	(jumlah unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra NKV / jumlah total usaha peternakan) x 100%	%	32	36	280.863.022	Bidang Peternakan	Kota Blitar
				Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar	(Jumlah unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar teknis / jumlah total unit usaha olahan hasil peternakan) x 100%	%	22,22	38,89			
				Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani	(jumlah kejadian penyakit hewan ternak yang tertangani / jumlah total kejadian penyakit hewan ternak dalam 1 tahun) x 100%	%	100	100			
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Angka kejadian kasus penyakit zoonosis	Angka kejadian kasus penyakit zoonosis dalam 1 tahun	Angka	0	0	64.515.000		
		3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah lokasi pelayanan pemeriksaan hewan Qurban	Jumlah lokasi pelayanan pemeriksaan hewan Qurban dalam 1 tahun	lokasi	295	300	64.515.000		
				Jumlah peserta KIE Zoonosis	Jumlah peserta KIE Zoonosis dalam 1 tahun	orang	30	118			
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan laboratorium dan jasa medic veteriner yang tersedia	(Jumlah jenis layanan laboratorium dan medic veteriner yang telah tersedia / Jumlah jenis layanan laboratorium dan jasa medic veteriner yang dibutuhkan) x 100%	%	50	60	188.645.522		
		3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah jenis penyediaan sarana dan prasarana laboratorium kesmavet	Jumlah jenis penyediaan sarana dan prasarana laboratorium kesmavet dalam 1 tahun	jenis	10	8	31.813.400		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2022			
								Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah jenis obat-obatan hewan yang tersedia	Jumlah jenis obat-obatan hewan yang tersedia dalam 1 tahun	jenis	10	36	156.832.122		
				Jumlah peserta KIE kesehatan hewan ke masyarakat	Jumlah peserta KIE kesehatan hewan ke masyarakat dalam 1 tahun	orang	20	115			
				Jumlah lokasi pelayanan terpadu	Jumlah lokasi pelayanan terpadu dalam 1 tahun	lokasi	19	19			
				Jumlah jenis sarana dan prasarana laboratorium kesehatan hewan	Jumlah jenis sarana dan prasarana laboratorium kesehatan hewan dalam 1 tahun	jenis	2	3			
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha produk hewan yang dibina	(Jumlah unit usaha hewan dan produk asal hewan yang dibina / jumlah total unit usaha produk hewan) x 100 %	%	25	32	22.904.800		
		3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah peserta pendampingan unit usaha produk hewan	Jumlah peserta pendampingan unit usaha produk hewan dalam 1 tahun	orang	225	90	14.843.100		
		3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel produk asal hewan yang diujikan	Jumlah sampel produk asal hewan yang diujikan dalam 1 tahun	sampel	50	125	8.061.700		
		3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Prosentase KIE yang terlaksana	(Jumlah KIE yang telah dilaksanakan / jumlah total KIE yang direncanakan) x 100%	%	30	50	4.797.700		
		3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah peserta KIE kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah peserta KIE kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dalam 1 tahun	orang	30	30	4.797.700		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2022			
								Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis	(jumlah usaha peternakan dan produk asal hewan yang sudah memenuhi rekomendasi persyaratan teknis / jumlah total usaha peternakan yang sudah memenuhi rekomendasi persyaratan teknis) x 100 %	%	30,77	35,38	51.191.500	Bidang Peternakan	Kota Blitar
		3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha produksi pakan ternak yang di keluarkan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha produksi pakan ternak yang di keluarkan dalam 1 tahun	rekomen dasi	1	1	46.802.900		
		3.27.06.2.02.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah laporan pengawasan perizinan peternakan	Jumlah laporan pengawasan perizinan peternakan dalam 1 tahun	dokumen	12	12	46.802.900		
				Jumlah peserta pembinaan perizinan peternakan	Jumlah peserta pembinaan perizinan peternakan dalam 1 tahun	orang	0	60			
		3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan yang di keluarkan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan yang di keluarkan dalam 1 tahun	rekomen dasi	0	1	4.388.600		
		3.27.06.2.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah peserta pembinaan izin usaha pengecer obat hewan	Jumlah peserta pembinaan izin usaha pengecer obat hewan dalam 1 tahun	orang	30	30	4.388.600		
JUMLAH									12.159.389.735		

Tabel. 6.2
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023-2026
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DAERAH KOTA BLITAR

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah				Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar		angka	83,92 (A)	84,71 (A)	8.164.175.201	84,73 (A)	8.572.383.961	84,75 (A)	9.001.003.159	84,77 (A)	9.431.053.317	84,77 (A)	35.168.615.638	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Meningkatnya Kinerja perangkat daerah			Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar		angka	83,92 (A)	84,71 (A)	8.164.175.201	84,73 (A)	8.572.383.961	84,75 (A)	9.001.003.159	84,77 (A)	9.431.053.317	84,77 (A)	35.168.615.638	Bagian Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan	Angka	80,25 (BAIK)	81 (BAIK)	8.164.175.201	81,25 (BAIK)	8.572.383.961	81,5 (BAIK)	9.001.003.159	81,75 (BAIK)	9.431.053.317	81,75 (BAIK)	35.168.615.638	Bagian Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	(jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar / jml. Dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun) x 100%	%	100	100	98.220.570	100	103.131.599	100	108.288.178	100	113.702.587	100	423.342.934		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam 1 tahun	dokumen	8	5	10.124.100	5	10.630.305	5	11.161.820	5	11.719.911	20	43.636.136		
		2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam 1 tahun	laporan	4	4	88.096.470	4	92.501.294	4	97.126.358	4	101.982.676	16	379.706.798		
		2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	(jumlah pelayanan administrasi keuangan yang sesuai standar / jml. Total pelayanan administrasi keuangan daerah) x 100%	%	100	100	6.572.757.508	100	6.799.395.382	100	7.206.465.154	100	7.608.788.410	100	28.187.406.454	41.665.224	
		2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	52	56	6.569.969.548	56	6.796.468.024	56	7.203.391.428	56	7.605.560.998	56	28.175.389.998		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.09.01.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dalam 1 tahun	laporan	5	5	2.787.960	5	2.927.358	5	3.073.726	5	3.227.412	20	12.016.456		
		2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	(jumlah pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar / jml. Total pelayanan administrasi kepegawaian daerah) x 100%	%	100	100	141.515.008	100	146.090.758	100	150.895.296	100	105.940.061	100	544.441.123		
		2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dalam 1 tahun	paket	0	2	64.500.000	1	50.000.000	1	50.000.000	0		112	164.500.000		
		2.09.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam 1 tahun	Orang	52	98	77.015.008	98	96.090.758	98	100.895.296	98	105.940.061	98	379.941.123		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi					
								2023		2024		2025		2026										
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	(jumlah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar / jml. Total ketersediaan administrasi umum perangkat daerah) x 100%	%	100	100		613.262.687	100		611.825.822	100		643.917.112	100		707.612.967	100		2.576.618.588		
		2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dalam 1 tahun	Paket	1	1		9.666.825	1		10.150.166	1		10.657.675	1		11.190.558	4		41.665.224		
		2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dalam 1 tahun	Paket	1	3		213.435.705	2		174.107.490	2		185.312.865	3		227.078.508	10		799.934.568		
		2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dalam 1 tahun	Paket	1	3		105.081.837	3		110.335.929	3		115.852.725	3		121.645.362	12		452.915.853		
		2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dalam 1 tahun	Paket	1	4		60.594.870	4		63.624.614	4		66.805.844	4		70.146.136	16		261.171.464		
		2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dalam 1 tahun	Paket	1	1		34.861.260	1		36.604.323	1		38.434.539	1		40.356.266	4		150.256.388		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.09.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah jenis Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan x 12 bulan	Paket	36	72		72		72		72		288			
		2.09.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam 1 tahun	laporan	37	56		56		56		56		224			
		2.09.01.2.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pasa SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pasa SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pasa SKPD dalam 1 tahun	dokumen	0	0		1		1		1		3			
		2.09.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- -- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	%	100	0		100		100		0		100			
		2.09.01.2.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dalam 1 tahun	Unit	0	0	0	0		2		0		2			
		2.09.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan dalam 1 tahun	Unit	0	0		1		0		0		1			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.09.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dalam 1 tahun	Unit	0	0	0	1	15.000.000	0	100.000.000	0	0	1	115.000.000		
		2.09.01.2.0 7.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan dalam 1 tahun	Unit	0	1	50.000.000	1	15.000.000	0	0	0	0	1	65.000.000		
		2.09.01.2.0 7.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan dalam 1 tahun	Unit	0	0	0	1	60.000.000	0	0	0	0	1	60.000.000		
		2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	(jumlah ketersediaan jasa penunjang urusan yang sesuai standar / jml. Total ketersediaan jasa penunjang urusan) x 100%	%	100	100	157.598.078	100	165.477.982	100	173.751.881	100	182.439.476	100	679.267.417		
		2.09.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik x 12 bulan	laporan	216	216	137.598.078	216	145.477.982	216	153.751.881	216	162.439.476	864	599.267.417		
		2.09.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam 1 tahun	laporan	0	13	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	52	80.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jumlah jenis BMD yang terpelihara ----- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	%	100	100	530.821.350	100	586.462.418	100	577.685.538	100	712.569.816	100	2.407.539.122		
		2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dalam 1 tahun	Unit	30	30	152.359.135	30	154.077.092	30	160.180.946	30	178.689.994	120	645.307.167		
		2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dalam 1 tahun	Unit	80	32	25.223.415	32	26.484.586	32	27.808.815	32	59.199.256	128	138.716.072		
		2.09.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara pada tahun berjalan dalam 1 tahun	Unit	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	0	0	2	20.000.000		
		2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi dalam 1 tahun	Unit	0	2	259.152.240	2	269.609.852	2	251.090.345	2	323.644.862	2	1.103.497.299		
		2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun berjalan dalam 1 tahun	Unit	0	1	94.086.560	1	126.290.888	1	128.605.432	1	151.035.704	4	500.018.584		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya ketahanan pangan daerah				Pembobotan 9 (Sembilan) indicator turunan dari 3 (tiga) aspek ketahanan (ketersediaan , keterjangkauan, pemanfaatan pangan) yang dibagi dalam 6 (enam) kategori kelompok wilayah yang menggambarkan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah (zona hijau menandakan wilayah dengan tingkat ketahanan pangan yang paling baik). IKP dihitung oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional.		angka	73,38	74,68	267.106.413	75,18	281.461.734	75,68	294.484.820	76,18	210.659.465	76,18	1.053.712.432	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kota Blitar
	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat			Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor PPH ideal = 100		angka	85,25	86,5	267.106.413	86,75	281.461.734	87	294.484.820	88,5	309.209.061	88,5	1.152.262.028	Bidang KP & Perikanan	Kota Blitar
		3.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka konsumsi energi per kapita	Angka konsumsi energi per kapita (kkal/kapita/ hari)	(kkal/kapita/ hari)	2225	2010	183.106.413	2051	193.261.734	2092	201.874.820	2133	211.968.561	2133	790.211.528	Bidang KP & Perikanan	Kota Blitar
				Angka ketersediaan energi perkapita/ hari	Angka ketersediaan energi perkapita/ hari	(kkal/kapita/ hari)	2200	2200		2200		2200		2200		2200			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Nilai capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	Rata-rata dari nilai ketersediaan informasi berdasarkan komoditas (K1), nilai ketersediaan informasi berdasarkan lokasi (K2) dan nilai ketersediaan informasi berdasarkan waktu (K3) (Permentan No. 65 Tahun 2010)	Angka	84	84	43.395.050	84	45.664.803	84	47.793.042	84	50.082.694	84	186.935.589		
		2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan dalam 1 tahun	laporan	1	1	2.961.420	1	3.109.491	1	3.264.966	1	3.428.214	4	12.764.091		
		2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia yang dikembangkan	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia yang dikembangkan dalam 1 tahun	unit	3	3	20.433.630	3	21.055.312	3	22.528.076	3	23.654.480	12	87.671.498		
		2.09.03.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dalam 1 tahun	Keluarga	10	10	20.000.000	10	21.500.000	10	22.000.000	10	23.000.000	40	86.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka konsumsi protein (gr/kapita/tahun)	Angka konsumsi protein (gr/kapita/tahun)	(gr/kapita/tahun)	86	57	139.711.363	57	147.596.931	57	154.081.778	57	161.885.867	57	603.275.939		
		2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dalam 1 tahun	laporan	1	2	84.999.118	2	90.249.074	2	93.761.528	2	98.549.604	4	367.559.324		
		2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun dalam 1 tahun	laporan	1	1	54.712.245	1	57.347.857	1	60.320.250	1	63.336.263	4	235.716.615		
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase balita rawan pangan yang tertangani	(jumlah balita rawan pangan yang diintervensi / jumlah total balita rawan pangan) x 100 %	%	12,12	13,83	71.400.000	14,52	74.970.000	15,24	78.718.500	16	82.654.425	16	307.742.925	Bidang KP & Perikanan	Kota Blitar
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis intervensi balita rawan pangan	Jumlah jenis intervensi balita rawan pangan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kali	2	2	71.400.000	2	74.970.000	2	78.718.500	2	82.654.425	10	307.742.925		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
								2023		2024		2025		2026						
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2.09.04.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	laporan	1	2		71.400.000	2		2		2		8			
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan segar (%)	(jumlah sampel pangan yang diuji dan dinyatakan aman / jumlah total sampel pangan segar yang diuji) x 100%	%	100	100		12.600.000	100		100		100		100		Bidang KP & Perikanan	Kota Blitar
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis sampel pangan segar yang diuji	(jumlah jenis sampel pangan segar yang diuji / jumlah total jenis sampel pangan segar yang harus diuji) x 100%	%	30	67		12.600.000	100		100		100		100			
		2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	dokumen		1		12.600.000	1		1		1		4			
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan				PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (dalam miliar) yang dikeluarkan oleh BPS Kota Blitar	milyar rupiah	195,65	197,81	4.282.142.785	198,8	4.281.225.492	199,79	4.435.823.621	200,79	4.720.051.108	200,79	17.719.243.006	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kota Blitar	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya			Produksi hasil budidaya ikan konsumsi	Jumlah total produksi ikan konsumsi dalam 1 tahun	kwintal	2310,3	2.464,92	464.822.495	2489,33	488.063.619	2519,1	512.466.800	2549,33	538.090.140	2549,33	2.003.443.054	Bidang KP & Perikanan	Kota Blitar
				Produksi hasil budidaya ikan hias	Jumlah total produksi ikan hias dalam 1 tahun	ekor	4.563.416	4.719.625		4.740.863		4.762.197		4.783.627					
				Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan	Rata-rata ((nilai output (Rp/Kg)-Sumbangan input lain (Rp/kg)-Harga bahan baku (Rp/kg))/ Nilai output x 100%)	%	N/A	31,20		31,80		32,40		33,00					
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis	(Jml. Kelompok budidaya ikan konsumsi, ikan hias dan UPR yang telah memenuhi rekomendasi standar teknis CPIB,CBIB, CPPIB / jml. Total kelompok budidaya ikan konsumsi dan UPR) x 100%	%	60,27	2,92	336.047.870	4,24	352.850.263	5,57	370.492.776	6,9	389.017.415	6,9	1.448.408.324	Bidang KP & Perikanan	Kota Blitar
				Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas	(jumlah benih ikan yang tersedia sesuai rekomendasi (CPIB) / jumlah produksi benih ikan) x 100%	%	13,67	15,07		15,07		15,82		15,82					

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan/ pelatihan/ pendampingan pengelolaan pembudidayaan ikan	(jumlah pembudidaya yang mendapatkan pendampingan/ pembinaan teknis pengelolaan pembudidayaan ikan / jumlah total pembudidaya ikan) x 100%	%	20	29,67	111.282.245	32,64	116.846.357	35,61	122.688.674	38,58	128.823.117	38,58	479.640.393		
		3.25.04.2.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas dalam 1 tahun	Kelompok	2	1	74.532.255	1	78.258.868	1	82.171.811	1	86.280.410	4	321.243.344		
		3.25.04.2.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dalam 1 tahun	Kelompok	5	5	36.749.990	5	38.587.489	5	40.516.863	5	42.542.707	20	158.397.049		
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pembudidaya ikan yang memenuhi standrat mutu budidaya perikanan	(jumlah pembudidaya yang yang memenuhi standrat mutu budidaya perikanan / jumlah total pembudidaya ikan) x 100%	%	0	1,48	224.765.625	2,08	236.003.906	2,67	247.804.102	3,26	260.194.298	3,26	968.767.931		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
								2023		2024		2025		2026						
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	dokumen	1	1		5.249.895	1	5.512.390	1	5.788.009	1	6.077.410	4	22.627.704		
		3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	unit	1	1		175.979.370	1	184.778.339	1	194.017.255	1	203.718.118	4	758.493.082		UPT Budidaya Air Tawar
		3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat dalam 1 tahun	orang	0	40		43.536.360	40	45.713.177	40	47.998.838	40	50.398.770	160	187.647.145		
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume penjualan hasil olahan perikanan (juta rupiah)	Jumlah penjualan hasil olahan perikanan tahun n	Juta rupiah	1066,5	34.230		128.774.625	34.572	135.213.356	34.918	141.974.024	35.267	149.072.725	35.267	555.034.730	Bidang KP & Perikanan	Kota Blitar
		3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pelaku usaha olahan hasil perikanan yang sudah memenuhi standar mutu	(jumlah pelaku usaha olahan hasil perikanan yang sudah memenuhi standar / jumlah total pelaku usaha olahan perikanan) x 100%	%	8,5	17,39		43.708.560	26,09	45.893.988	34,78	48.188.687	43,48	50.598.122	43,48	188.389.357		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3.25.06.2.0.2.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko dalam 1 tahun	Unit Usaha	2	2		2		2		2		8			
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka konsumsi ikan perkapita/ tahun	Angka konsumsi ikan perkapita/ tahun (kg/kapita/ tahun)	(kg/ kapita/ tahun)	17,5	18,4	85.066.065	18,6	18,8		19		19				
		2.25.06.2.0.3.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	Ton	50	10	43.708.560	10		10		10		40			
		3.25.06.2.0.3.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dalam 1 tahun	Pelaku Usaha	5	10	41.357.505	10		10		10		40			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura			Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (dalam kwintal)	Jumlah total produksi tanaman pangan dan hortikultura dalam 1 tahun	kwintal	197.890	198206,74	2.892.196.557	198325,67	2.765.150.387	198444,66	2.903.407.906	198563,73	3.048.578.304	198563,73	11.609.333.154	Bidang TPHP	Kota Blitar
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang tersedia	(Jumlah sarana pertanian yang sudah tersedia/ Jumlah total kebutuhan sarana pertanian) x 100%	%	60	72	181.180.230	73	190.239.241	74	199.751.203	75	209.738.764	75	780.909.438	Bidang TPHP	Kota Blitar
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	(jumlah kelompok tani tanaman pangan horti yang dimonev / jumlah total kelompok pangan horti) x 100%	%	10	40	181.180.230	60	190.239.241	80	199.751.203	100	209.738.764	100	419.477.528		
		3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi dalam 1 tahun	Laporan	1	1	90.179.145	1	94.688.102	1	99.422.507	1	104.393.633	4	209.738.764		
		3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dalam 1 tahun	laporan	1	1	91.001.085	1	95.551.139	1	100.328.696	1	105.345.131	4	209.738.764		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik	(Jumlah prasarana yang tersedia dalam kondisi baik / Jumlah kebutuhan prasarana) x 100%	%	40	51,39	2.293.952.535	51,9	2.136.994.163	52,42	2.243.843.869	52,94	2.356.036.063	52,94	9.030.826.630	Bidang TPHP	Kota Blitar
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase data dukung Raperda LP2B yang tersedia	(Jumlah data dukung yang sudah tersedia / jumlah data dukung yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) x 100%	%	25	100	86.189.985	100	90.499.485	100	95.024.458	100	99.775.681	100	371.489.609		
		3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B	Dokumen pendukung/Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B yang tersusun dalam 1 tahun	dokumen	1	1	80.440.395	1	84.462.415	1	88.685.535	1	93.119.812	4	346.708.157		
		3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya dalam 1 tahun	laporan	1	1	5.749.590	1	6.037.070	1	6.338.923	1	6.655.869	4	24.781.452		
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang tersedia	((Jumlah JITU tersedia + Jumlah JUT/JP tersedia + Jumlah Longstorage tersedia + Jumlah Pintu Air tersedia + Jumlah BPP tersedia) : (Jumlah	%	60,5	69,90	2.207.762.550	70,61	2.046.494.678	70,33	2.148.819.411	70,05	2.256.260.382	70,05	8.659.337.021		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					kebutuhan JITUT + Jumlah kebutuhan JUT/JP + Jumlah kebutuhan Longstorage + Jumlah kebutuhan pintu air + Jumlah kebutuhan BPP) X 100%														
		3.27.03.2.0 2.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara dalam 1 tahun	Unit	5	4	790.070.400	5	829.573.920	5	871.052.616	5	914.605.247	19	3.405.302.183		
		3.27.03.2.0 2.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara dalam 1 tahun	Unit	1	4	945.000.000	4	992.250.000	4	1.041.862.500	4	1.093.955.625	16	4.073.068.125		
		3.27.03.2.0 2.05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Jumlah Long Storage yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dalam 1 tahun	unit	0	1	258.720.000	0	0	0	0	0	0	1	258.720.000		
		3.27.03.2.0 2.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Jumlah pintu air yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dalam 1 tahun	unit	1	5	204.288.000	5	214.502.400	5	225.227.520	5	236.488.896	20	880.506.816		
		3.27.03.2.0 2.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah balai penyuluh dikecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Jumlah balai penyuluh dikecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dalam 1 tahun	unit	0	3	9.684.150	3	10.168.358	3	10.676.775	3	11.210.614	3	41.739.897		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur	(Luas serangan OPT yang ditangani sesuai prosedur / Luas kejadian serangan OPT) x 100% Sesuai prosedur = sesuai SOP	%	100	100	96.064.500	100	100.867.725	100	105.911.111	100	111.206.667	100	414.050.003	Bidang TPHP	Kota Blitar
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan bahan pengendalian OPT	(Jumlah bahan pengendalian OPT yang tersedia / jumlah kebutuhan bahan pengendalian OPT) x 100%	%	10	13	96.064.500	13	100.867.725	13	105.911.111	13	111.206.667	13	414.050.003		
		3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan dalam 1 tahun	Ha	75	100	96.064.500	100	100.867.725	100	105.911.111	100	111.206.667	400	414.050.003		
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis	(Jumlah usaha hasil pertanian yang sudah memenuhi rekomendasi persyaratan teknis / Jumlah total usaha hasil pertanian) x 100%	%	0	33	71.445.675	41,66	75.017.959	50	78.768.857	58,33	82.707.300	58,33	307.939.791	Bidang TPHP	Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi					
								2023		2024		2025		2026										
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pertanian yang memenuhi standar teknis	Jumlah pelaku usaha pertanian yang memenuhi standar teknis sd. Tahun berjalan	unit	0	15		71.445.675	20		75.017.959	25		78.768.857	30		82.707.300	30		307.939.791		
		3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian dalam 1 tahun	dokumen	0	1		71.445.675	1		75.017.959	1		78.768.857	1		82.707.300	4		307.939.791		
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani	(Rata-rata nilai kelas kelompok tahun n - jumlah rata-rata nilai kelas kelompok tahun n-1 / rata-rata nilai kelas kelompok tahun n-1) x 100%	%	0,73	0,93	249.553.617		0,93	262.031.299		0,93	275.132.866		0,93	288.889.510		0,93	1.075.607.292	Bidang TPHP	Kota Blitar	
				Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis	(jumlah kelompok tani yang telah menerapkan metode budidaya agribisnis / jumlah total kelompok tani) x 100%	%	0	9,52			14,29			19,05			23,81			23,81				
Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital	(jumlah produk segar/olahan tanaman pangan dan hortikultura yang sudah dipasarkan secara digital /			%	0	25		30,56			33,33			38,89			38,89							

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					jumlah total produk segar/olahan tanaman pangan dan hortikultura) x 100%														
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase petani yang menerima peningkatan kapasitas SDM	Jumlah petani yang menerima pelatihan/ bimtek/ workshop / jumlah total petani yang terdaftar dalam kelompok tani x 100%	%	15	35	249.553.617	40	262.031.299	45	275.132.866	50	288.889.510	50	1.075.607.292		
		3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya dalam 1 tahun	Unit	3	3	57.689.637	3	60.574.121	3	63.602.829	3	66.782.970	3	248.649.557		
		3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya dalam 1 tahun	unit	21	21	186.632.145	21	195.963.752	21	205.761.939	21	216.050.037	84	804.407.873		
		3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah saranan dan prasarana penyuluhan pertanian	Jumlah saranan dan prasarana penyuluhan pertanian dalam 1 tahun	unit	1	3	5.231.835	3	5.493.426	3	5.768.098	3	6.056.503	12	22.549.862		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Terjaganya produksi hasil peternakan			Produksi hasil peternakan	Jumlah total produksi hasil peternakan (telur, susu, daging) dalam 1 tahun	Kwintal	83.818	84651,19	925.123.733	84827,72	1.028.011.486	85042,36	1.019.948.915	85356,3	1.133.382.664	85356,3	4.106.466.798		
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak	(jumlah usaha peternakan yang telah melakukan penanganan limbah tahun n - n-1 / jumlah total usaha peternakan n-1) x 100%	%	12,96	20,37	232.733.760	24,04	301.002.014	27,78	256.588.970	31,48	331.854.721	31,48	1.122.179.465	Bidang Peternakan	Kota Blitar
				Persentase pelaku usaha obat hewan yang sesuai standar)	(jumlah pelaku usaha obat hewan yang memenuhi persyaratan teknis / jumlah total pelaku usaha obat hewan) x 100%	%	9,68	19,35		22,58		25,81		29,03		29,03			
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang dibina	Jumlah peternakan yang mendapat pembinaan dalam 1 tahun / jumlah total peternak x 100%	%	10	20	149.978.220	30	157.477.131	40	165.350.987	50	173.618.537	50	646.424.875		
		3.27.02.2.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman dalam 1 tahun	dokumen	1	4	149.978.220	4	157.477.131	4	165.350.987	4	173.618.537	16	646.424.875		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan penggunaan pakan ternak yang sesuai standar	(jumlah pelaku usaha peternakan yang menggunakan/ mengedarkan pakan ternak sesuai standar / jumlah total pelaku usaha peternakan) x 100%	%	100	100	77.350.455	100	81.217.978	100	85.278.877	100	89.542.820	100	333.390.130		
		3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil dalam 1 tahun	laporan	1	2	57.350.455	2	60.217.978	2	63.278.877	2	66.542.820	8	247.390.130		
		3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang beredar	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang beredar dalam 1 tahun	laporan	1	1	20.000.000	1	21.000.000	1	22.000.000	1	23.000.000	4	86.000.000		
		3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase penyediaan benih/bibit ternak untuk demplot	(jumlah bibit ternak demplot yang tersedia / jumlah total kebutuhan bibit ternak) x 100 %	%	0	0	0	100	56631566	0	0	100	62436302	100	119.067.868		
		3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain dalam 1 tahun	Ekor	0	0	0	4	56.631.566	0	0	4	62.436.302	8	119.067.868		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase obat hewan yang sudah teregister	(jumlah jenis obat hewan yang teregister / jumlah jenis total obat hewan) x 100%	%	20	55	5.405.085	60	5.675.339	65	5.959.106	70	6.257.062	70	23.296.592		
		3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan yang Beredar	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan yang Beredar dalam 1 tahun	Laporan	1	1	5.405.085	1	5.675.339	1	5.959.106	1	6.257.062	4	23.296.592		
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PETANIAN	Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)	(Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang lulus pemeriksaan antemortem, postmortem : Jumlah total hewan yang dipotong di RPH) X 100%	%	100	100	343.732.725	100	360.919.361	100	378.965.329	100	397.913.596	100	1.481.531.011	Bidang Peternakan	Kota Blitar
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana RPH yang ditingkatkan	(jumlah prasarana RPH yang tersedia dan dalam kondisi baik / jumlah kebutuhan prasarana RPH) x 100%	%	30	60	343.732.725	70	360.919.361	80	378.965.329	90	397.913.596	90	1.481.531.011		
		3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dalam 1 tahun	Unit	3	3	343.732.725	3	360.919.361	3	378.965.329	3	397.913.596	3	1.481.531.011		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	(jumlah unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra NKV / jumlah total usaha peternakan) x 100%	%	32	40	294.906.173	44	309.651.482	48	325.134.056	52	341.390.759	52	1.271.082.470	Bidang Peternakan	Kota Blitar
				Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar	(Jumlah unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar teknis / jumlah total unit usaha olahan hasil peternakan) x 100%	%	22,22	44,44		55,56		61,11		72,22		72,22			
				Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani	(jumlah kejadian penyakit hewan ternak yang tertangani / jumlah total kejadian penyakit hewan ternak dalam 1 tahun) x 100%	%	100	100		100		100		100		100			
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Angka kejadian kasus penyakit zoonosis	Angka kejadian kasus penyakit zoonosis dalam 1 tahun	Angka	0	0	67.740.750	0	71.127.787	0	74.684.178	0	78.418.386	0	291.971.101		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi					
								2023		2024		2025		2026										
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulanga n Penyakit Hewan dan Zoonosis dalam 1 tahun	Laporan	1	2		67.740.750	2		71.127.787	2		74.684.178	2		78.418.386	8		291.971.101		
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan laboratorium dan jasa medic veteriner yang tersedia	(Jumlah jenis layanan laboratorium dan medic veteriner yang telah tersedia / Jumlah jenis layanan laboratorium dan jasa medic veteriner yang dibutuhkan) x 100%	%	50	63		198.077.798	67		207.981.689	69		218.380.772	71		229.299.811	71		853.740.070		
		3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dalam 1 tahun	Laporan	1	1		33.404.070	1		35.074.274	1		36.827.987	1		38.669.387	4		143.975.718		
		3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner dalam 1 tahun	Laporan	1	4		164.673.728	4		172.907.415	4		181.552.785	4		190.630.424	16		709.764.352		
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha produk hewan yang dibina	(Jumlah unit usaha hewan dan produk asal hewan yang dibina / jumlah total unit usaha produk hewan) x 100 %	%	25	36		24.050.040	40		25.252.542	44		26.515.169	48		27.840.928	48		103.658.679		
		3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan dalam 1 tahun	Laporan	1	1		15.585.255	1		16.364.518	1		17.182.744	1		18.041.881	4		67.174.398		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
								2023		2024		2025		2026						
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam 1 tahun	dokumen	1	1		8.464.785	1	8.888.024	1	9.332.425	1	9.799.047	4	36.484.281		
		3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Prosentase KIE yang telah terlaksana	(Jumlah KIE yang telah dilaksanakan / jumlah total KIE yang direncanakan) x 100%	%	30	75		5.037.585	100	5.289.464	100	5.553.937	100	5.831.634	100	21.712.620		
		3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan dalam 1 tahun	laporan	1	1		5.037.585	1	5.289.464	1	5.553.937	1	5.831.634	4	21.712.620		
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis	(jumlah usaha peternakan dan produk asal hewan yang sudah memenuhi rekomendasi persyaratan teknis / jumlah total usaha peternakan yang sudah memenuhi rekomendasi persyaratan teknis) x 100 %	%	30,77	40		53.751.075	44,62	56.438.629	49,23	59.260.560	53,85	62.223.588	53,85	231.673.852	Bidang Peternakan	Kota Blitar
		3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha produksi pakan ternak yang di keluarkan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha produksi pakan ternak yang di	rekomendasi	1	1	49.143.045	1	51.600.197	1	54.180.207	1	56.889.217	4	211.812.666			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		keluarkan dalam 1 tahun														
		3.27.06.2.02.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi dalam 1 tahun	Laporan	1	2	49.143.045	2	51.600.197	2	54.180.207	2	56.889.217	8	211.812.666		
		3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan yang di keluarkan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan yang di keluarkan dalam 1 tahun	rekomen dasi	0	1	4.608.030	1	4.838.432	1	5.080.353	1	5.334.371	4	19.861.186		
		3.27.06.2.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan uang Diawasi	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan uang Diawasi dalam 1 tahun	Laporan	0	1	4.608.030	1	4.838.432	1	5.080.353	1	5.334.371	4	19.861.186		
JUMLAH									12.713.424.398		13.134.071.185		13.731.311.602		14.480.313.485		54.059.120.670		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Tabel. 7.1

Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar yang mengacu pada Tujuan RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Formulasi/Definisi Operasional	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMD 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indek Ketahanan Pangan	Pembobotan 9 (Sembilan) indicator turunan dari 3 (tiga) aspek ketahanan yang dibagi dalam 6 (enam) kategori kelompok wilayah yang menggambarkan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. IKP dihitung oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional.	73,38	74,18	74,68	75,18	75,68	76,18	76,18
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor PPH ideal = 100	85,25	86,25	86,5	86,75	87	88,5	88,5
3	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (miliar rupiah)	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (dalam miliar) yang dikeluarkan oleh BPS Kota Blitar	195,65	196,82	197,81	198,80	199,79	200,79	196,24
4	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (kwintal)	Jumlah total produksi tanaman pangan dan hortikultura dalam 1 tahun (kwintal)	197.890	198.186,93	198.206,74	198.325,67	198.444,66	198.563,73	198.563,73
5	Jumlah produksi hasil peternakan (kwintal)	Jumlah total produksi hasil peternakan (telur, susu, daging) dalam 1 tahun (kwintal).	83818,00	84321,66	84651,19	84827,72	85042,36	85356,30	85356,30
6	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi (kwintal)	Jumlah total produksi ikan konsumsi dalam 1 tahun (kwintal)	2310,3	2.404,80	2.464,92	2.489,33	2.519,10	2.549,33	2.549,33
7	Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias (ekor)	Jumlah total produksi ikan hias (ekor) dalam 1 tahun	4.563.416	4.698.482,45	4.719.625,62	4.740.863,94	4.762.197,83	4.783.627,72	4.783.627,72
8	Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan	Rata-rata (nilai output (Rp/Kg)-Sumbangan input lain (Rp/kg)-Harga bahan baku (Rp/kg) / Nilai output) x 100%)	30	31,20	31,80	32,40	33,00	33,60	33,60
9	Nilai SAKIP PD	Nilai SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Irda	83,92 (A)	84,7 (A)	84,71 (A)	84,73 (A)	84,75 (A)	84,77 (A)	84,77 (A)

Tabel. 7.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/Definisi Operasional	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir 2026
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Skor PPH Konsumsi	Angka	Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor PPH ideal = 100	85,25	86,25	86,5	86,75	87	88,5	88,5
2	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	Kwintal	Jumlah total produksi tanaman pangan dan hortikultura dalam 1 tahun (kwintal)	197.890	198.186,93	198.206,74	198.325,67	198.444,66	198.563,73	198.563,73
3	Jumlah produksi hasil peternakan	Kwintal	Jumlah total produksi hasil peternakan (telur, susu, daging) dalam 1 tahun (kwintal).	83.818	84.322	84.651	84.828	85.042	85.356	85.356
4	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	Kwintal	Jumlah total produksi ikan konsumsi dalam 1 tahun (kwintal)	2.310,3	2.404,80	2.464,92	2.489,33	2.519,10	2.549,33	2.549,33
5	Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	ekor	Jumlah total produksi ikan hias (ekor) dalam 1 tahun	4.563.416	4.698.482	4.719.626	4.740.864	4.762.198	4.783.628	4.783.628

8

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Kedua Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2016 – 2021 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar tahun 2021 – 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar. Perubahan Kedua Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar. Selain itu, Perubahan Kedua Rencana Strategis juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Apabila terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), maka akan dilakukan kembali Perubahan Rencana Strategis dengan berpedoman pada kewenangan urusan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Blitar, 17 Mei 2023
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN

R. RODIYAH
Pembina Utama Muda
NIP 19630610 199203 2 008